PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INDEKS EKONOMI HIJAU

KABUPATEN TANGERANG

Laporan Akhir



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Kajian Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota dengan dinamika pembangunan yang pesat, memiliki peran strategis dalam mewujudkan model pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kajian Indeks Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat menjadi landasan data dan analisis yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program yang pro-lingkungan dan pro-pertumbuhan hijau.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mendorong transisi menuju ekonomi hijau di Kabupaten Tangerang, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan selanjutnya di bidang ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I - PENDAHULUAN 1-1
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Maksud dan Tujuan 1-3
1.3. Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*) 1-3
1.4. Dasar Hukum 1-3
1.5. Sistematika Pembahasan 1-4
BAB II – LANDASAN TEORI 2-1
2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2-1
2.2. Ekonomi Hijau 2-3
2.3. Indeks Ekonomi Hijau 2-7
2.4. Tinjauan Kebijakan 2-11
2.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 2-11
2.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 2-13
2.4.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang 2025 – 2029 2-15
1. Misi Pertama: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 2-15
2. Misi Kedua: Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing 2-15

3. Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas....2-15
4. Misi Keempat: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas....2-15
5. Misi Kelima: Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur....2-15
6. Misi Keenam: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan....2-15
BAB III – METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN....3-1
3.1 Ruang Lingkup Wilayah....3-1
3.2 Metode Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau....3-4
BAB IV PROFIL WILAYAH....4-1
4.1 Profil Umum Wilayah Kabupaten Tangerang....4-1
4.1.1 Topologi....4-1
4.1.2 Geologi....4-2
4.1.3 Hidrologi....4-2
4.1.4 Topologi....4-4
4.1.5 Penggunaan Lahan....4-5
4.1.6 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung....4-6
4.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah....4-7
4.1.8 Wilayah Rawan Bencana....4-8
4.1.9 Indeks Risiko Bencana....4-10
4.2 Kondisi Demografi Kabupaten Tangerang....4-11
4.2.1 Jumlah Penduduk....4-11
4.2.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk....4-11
4.3 Gambaran Indikator IEH Kabupaten Tangerang....4-12
4.3.1 Pilar Lingkungan....4-12
4.3.2 Pilar Ekonomi....4-16

4.3.3 Profil Sosial 4-21
BAB V INDEKS EKONOMI HIJAU KABUPATEN TANGERANG 5-1
5.1 Skor Indikator Masing – Masing Pilar 5-1
5.1.1 Indikator Lingkungan 5-1
5.1.2 Indikator Ekonomi 5-4
5.1.3 Indikator Sosial 5-7
5.2 Tren Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang 5-9
5.3 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang 5-11
DAFTAR PUSTAKA 5-12

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Indikator Pilar Lingkungan 2-9
Tabel 2-2 Indikator Pilar Ekonomi 2-9
Tabel 2-3 Indikator Pilar Sosial 2-10
Tabel 2-4 Indikator Capaian Penerapan Ekonomi Hijau dalam RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045 2-13
Tabel 2-5 Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2030 yang Terkait dengan IEH 2-16
Tabel 3-1 Luas Wilayah Kabupaten Tangerang Per Kecamatan 3-1
Tabel 3-2 Penyesuaian Kriteria Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang 3-5
Tabel 3-3 Kriteria Skor Indeks Ekonomi Hijau 3-7
Tabel 4-1 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 4-4
Tabel 4-2 Kondisi Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2024 4-4
Tabel 4-3 Kondisi Kelembapan 4-5
Tabel 4-4 Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang 4-5
Tabel 4-5 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022 4-13
Tabel 5-1 Skor Per Indikator Lingkungan 5-1
Tabel 5-2 Skor Per Indikator Ekonomi 5-4
Tabel 5-3 Skor Per Indikator Sosial 5-7
Tabel 5-4 Skor Total Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang 5-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2-2
Gambar 2.2 TransisiEkonomi Coklat ke Ekonomi Hijau dalam rangka Mendukung SDGs 2-5
Gambar 2.3 Keterkaitan Antar Pilar dan Indikator – Indikator IEH 2-8
Gambar 2.4 Pemetaan Visi Indonesia 2045 dengan Sasaran Visi 2-11
Gambar 2.5 Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025 – 2045 Tahap I 2-14
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Tangerang 3-3
Gambar 4.1 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019 – 2023 4-11
Gambar 4.2 Rasio RTH Publik Kabupaten Tangerang 2019 – 2024 4-12
Gambar 4.3 Persentase Sampah Tertangani Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 4-14
Gambar 4.4 Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024 4-17
Gambar 4.5 *Positioning Matrix* Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang 4-18
Gambar 4.6 PDRB per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2024 4-19
Gambar 4.7 Produktivitas Agrikultur (Ton/Ha) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 4-21
Gambar 4.8 Rata – Rata Lama Sekolah Kab. Tangerang, Prov. Banten, dan Nasional 4-23
Gambar 4.9 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 4-24
Gambar 4.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang 4-26
Gambar 4.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang 4-27
Gambar 5.1 Tren Skor Indikator Lingkungan Kabupaten Tangerang 5-3
Gambar 5.2 Tren Skor Indikator Ekonomi 5-6
Gambar 5.3 Tren Skor Indikator Sosial 5-9
Gambar 5.4 Tren Perkembangan Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang 5-10

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi arah strategis nasional maupun global dalam menjawab tantangan krisis lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy*) muncul sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan serta keadilan sosial. Ekonomi Hijau menekankan efisiensi sumber daya, rendah emisi karbon, serta pembangunan yang inklusif dan berketahanan.

Pada tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia mempublikasi laporan terkait dengan indikator untuk mengukur ekonomi hijau dalam suatu laporan dengan judul "*Green Economy Index: A Step Forward to Measure The Progress of Low Carbon & Green Economy in Indonesia*". Indeks Ekonomi Hijau merupakan salah satu indikator strategis yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi hijau telah terintegrasi dalam pembangunan daerah. Indeks tersebut muncul sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang bukan hanya merusak tatanan ekonomi tetapi juga progres terhadap perbaikan kondisi sosial di Indonesia seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Keberadaan pandemi menambah tantangan bagi Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 dan Indonesia Emas 2045 selain tantangan iklim. Analisis dari BAPPENAS menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan setidaknya pertumbuhan ekonomi sebesar 6% untuk memenuhi visi 2045 tersebut. Keberadaan Indeks Ekonomi Hijau ini ditujukan sebagai *game changer* dalam merumuskan pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan ataupun merusak tatanan sosial (*sustainable development*). Oleh karena itu, kajian Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Tangerang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan capaian pembangunan hijau daerah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan eviden.

Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi yang pesat di Provinsi Banten, menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan aktivitas industri, urbanisasi, serta penggunaan lahan yang intensif dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang menunjukkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha pada tahun 2023 sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan pada tahun 2022 yang mana pertumbuhan ekonominya berada pada angka 5,18%. Namun hal tersebut masih dapat didukung diantaranya dengan kondisi sosial yang meningkat diantaranya adalah dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 76,19% pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen untuk mengukur dan memantau kinerja ekonomi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian Indeks Ekonomi Hijau Wilayah Kabupaten Tangerang ditujukan untuk dapat mengambil potret mengenai implementasi ekonomi hijau berdasarkan tiga pilar dan 15 indikator. Tiga pilar tersebut meliputi pilar lingkungan yang diantaranya terdapat indikator tutupan hutan, kontribusi energi terbarukan, pengelolaan sampah, reduksi emisi gas rumah kaca (GRK), dan persentase penurunan lahan gambut. Pilar selanjutnya adalah pilar ekonomi yang terdiri atas indikator intensitas emisi, intensitas emisi akhir, pendapatan nasional bruto, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sektor industri, dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa. Sementara itu, pilar terakhir adalah pilar sosial yang meliputi indikator rata – rata lama sekolah, harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Ketiga pilar dan kelimabelas indikator tersebut nantinya akan dapat disesuaikan dengan konteks Kabupaten Tangerang yang selanjutnya akan dipadukan dalam suatu perhitungan tertentu menjadi Indeks Ekonomi Hijau. Melalui kajian ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan dapat menyusun strategi pembangunan daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan analisis mengenai indeks ekonomi hijau wilayah di Kabupaten Tangerang dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah: melakukan analisis indeks ekonomi hijau wilayah di Kabupaten Tangerang.

1.3. Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*)

Indikator keluaran studi ini antara lain :

1) Terlaksananya penyusunan Kajian Indeks Ekonomi Wilayah Kabupaten Tangerang.

Sedangkan hasil dari studi ini adalah:

1. Tersedianya indikator dan nilai Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang yang terukur dan terverifikasi.
2. Teridentifikasinya isu-isu strategis dan potensi daerah dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
3. Terumuskannya rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatnya pemahaman dan kapasitas pemangku kebijakan di Kabupaten Tangerang dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan daerah.

1.4. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011 – 2031
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada laporan ini meliputi:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, luaran, landasan hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Pendahuluan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Pada bab 2 berisikan landasan teori dan tinjauan pustaka terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

BAB 3 : METODOLOGI PEKERJAAN

Pada bab ke 3 dari Laporan Pendahuluan akan dibahas mengenai Metodologi, tahapan studi, dan Rencana kerja dari pelaksanaan pekerjaan

BAB 4 : ORGANISASI DAN JADWAL

Pada bab ke 4 dari Laporan Pendahuluan akan dibahas mengenai organisasi pelaksana kegiatan ini berikut dengan jadual pelaksanaan kegiatannya

BAB II – LANDASAN TEORI

2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma global yang disepakati dalam *Agenda 2030 for Sustainable Development* oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa/PBB (United Nations) sejak tahun 2015. Kesepakatan dalam agenda tersebut melahirkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yang merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Tujuan-tujuan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terintegrasi, dan menjadi pedoman bagi negara-negara dalam merancang kebijakan dan program pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri memiliki makna yaitu suatu konsep pembangunan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (World Commission on Environment and Development (WCED), 1987). Dengan demikian, gagasan mengenai SDGs bukan merupakan gagasan baru melainkan hasil dari karya pemikiran dan upaya global yang telah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa peristiwa penting yang dapat merangkum lahirnya SDGs pada tahun 2015 diantaranya adalah:

1. *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 yang memunculkan Agenda 21, sebuah rencana aksi komprehensif untuk menciptakan kerjasama global dalam rangka pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan melestarikan alam.
2. *Millenium Summit* pada September tahun 2000 melahirkan *Millenium Development Goals* (MDGs) di Markas PBB, New York yang menghasilkan 8 tujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim pada tahun 2015.
3. *World Summit on Sustainable Development* yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 mengevaluasi 10 tahun pelaksanaan Agenda 21 yang menghasilkan Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan untuk menekankan implementasi dari komitmen dalam *Earth Summit*.

4. *Rio+20/United Nations Conference on Sustainable Development* pada Juni 2012 yang dilaksanakan kembali di Rio de Janeiro, Brasil menekankan pentingnya konsep ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan yang mana menghasilkan juga kesepakatan mengenai urgensi pengganti MDGs (cikal bakal SDGs).
5. *United Nations Sustainable Development Summit* pada tanggal 25 September 2015 yang dilaksanakan di New York melahirkan SDGs yang menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang berlaku secara global baik untuk negara maju maupun negara berkembang.



Sumber: United Nations

Gambar 2.1 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dari 17 tujuan tersebut, beberapa tujuan SDGs yang sangat relevan dalam konteks ekonomi hijau antara lain:

- **Tujuan 7**: Energi bersih dan terjangkau
- **Tujuan 8**: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

- **Tujuan 9**: Industri, inovasi, dan infrastruktur
- **Tujuan 11**: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
- **Tujuan 12**: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- **Tujuan 13**: Penanganan perubahan iklim

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah SDGs (RAD SDGs). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi hijau yang mengutamakan efisiensi sumber daya, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan menjadi sangat relevan dalam mendukung pencapaian target SDGs di tingkat lokal.

2.2. Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan suatu konsep pertumbuhan ekonomi yang mana memberikan ruang untuk aktivitas ekonomi agar tetap berkembang tetapi perkembangannya bersifat berkelanjutan (dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang) yang meliputi aktivitas ekonomi di darat maupun di laut (*blue economy*) (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Ekonomi hijau adalah istilah umum mengenai seluruh aktivitas, investasi, maupun infrastruktur ekonomi yang bertentangan dengan konsep ekonomi coklat (*brown economy*), yaitu konsep ekonomi yang tidak mengikuti asas – asas berkelanjutan. Terdapat beberapa definisi mengenai ekonomi hijau yang mana meskipun terdapat sedikit perbedaan namun secara konsep dan prinsip tetap sama, diantaranya:

- United Nations General Assembly: Ekonomi hijau merupakan salah satu alat penting yang dapat digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (UNGA, 2012).
- United Nations Environment Programme: ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, modal, infrastruktur, ketenagakerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (UNEP, 2012).

Kedua definisi tersebut menjabarkan dengan tegas bahwa ekonomi hijau merupakan bagian terpenting dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pemerintah Republik Indonesia memulai strategi transformasi ekonomi yang dicanangkan pada RPJMN 2020 – 2024 mengintegrasikan ekonomi hijau di dalam pembangunan yang mana bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekslusif yang beriringan dengan mewujudkan kesejahteraan sosial dan mempertahankan kualitas lingkungan.



Sumber: Bappenas, 2022

Gambar 2.2 TransisiEkonomi Coklat ke Ekonomi Hijau dalam rangka Mendukung SDGs

Gambar 2.2 menjelaskan mengenai persepsi Bappenas dalam rangka pencapaian SDGs dengan menggaungkan transisi ekonomi coklat menuju ekonomi hijau yang mana secara perlahan Indonesia diarahkan untuk meninggalkan aktivitas ekonomi konvensional

(*brown economy*) yang dinilai mengabaikan kelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial. Adapun ekonomi coklat itu sendiri merupakan suatu model ekonomi yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil, yang menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), polusi udara, dan limbah yang signifikan, serta kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi berlebihan. Implementasi konsep ekonomi hijau tidak lagi mengorbankan salah satu antara ekonomi, sosial, dan lingkungan melainkan ketiganya dapat tumbuh bersama menuju pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau dapat dicapai diantaranya dengan penggunaan energi terbarukan untuk industri dan transportasi, penggeseran menuju industri rendah karbon, mempromosikan ekonomi sirkuler, dan meningkatkan produktivitas ekonomi baik di darat maupun laut tanpa eksploitasi berlebihan dan merusak ekosistem.

Selanjutnya, Bappenas pun menjelaskan dalam *Green Economy Report* bahwa implementasi ekonomi hijau akan memberikan dampak positif dan membawa Indonesia untuk mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Hasil simulasi yang dilakukan oleh Bappenas menunjukkan bahwa praktik ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim memberikan beberapa keuntungan bagi Indonesia, diantaranya:

- Pengurangan emisi hampir 68% pada tahun 2045, sebelum target NZE tahun 2060.
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 – 6,5 % per tahun sampai 2050.
- Pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 87 – 96 miliar ton CO_2e (ekivalen karbon dioksida) pada tahun 2021 – 2060.
- Peningkatan Pendapatan Nasional sebesar 25 – 34% di tahun 2045.
- Penciptaan 1,8 juta tambahan lapangan pekerjaan hijau diantaranya di bidang energi, kendaraan listrik, restorasi lahan, dan pengelolaan sampah/limbah.
- Terciptanya nilai pengembalian ekosistem sebesar $4,7 triliun/tahun di tahun 2060.
- Terselamatkannya 40.000 nyawa di tahun 2045 dari berkurangnya polusi udara.
- Peningkatan hutan bakau hingga 3,6 juta Ha pada tahun 2060.

- Perlindungan 3,2 juta Ha hutan pada tahun 2060.
- Penambahan 4,1 juta Ha tutupan hutan pada tahun 2060.
- Peningkatan ketahanan iklim untuk perekonomian.

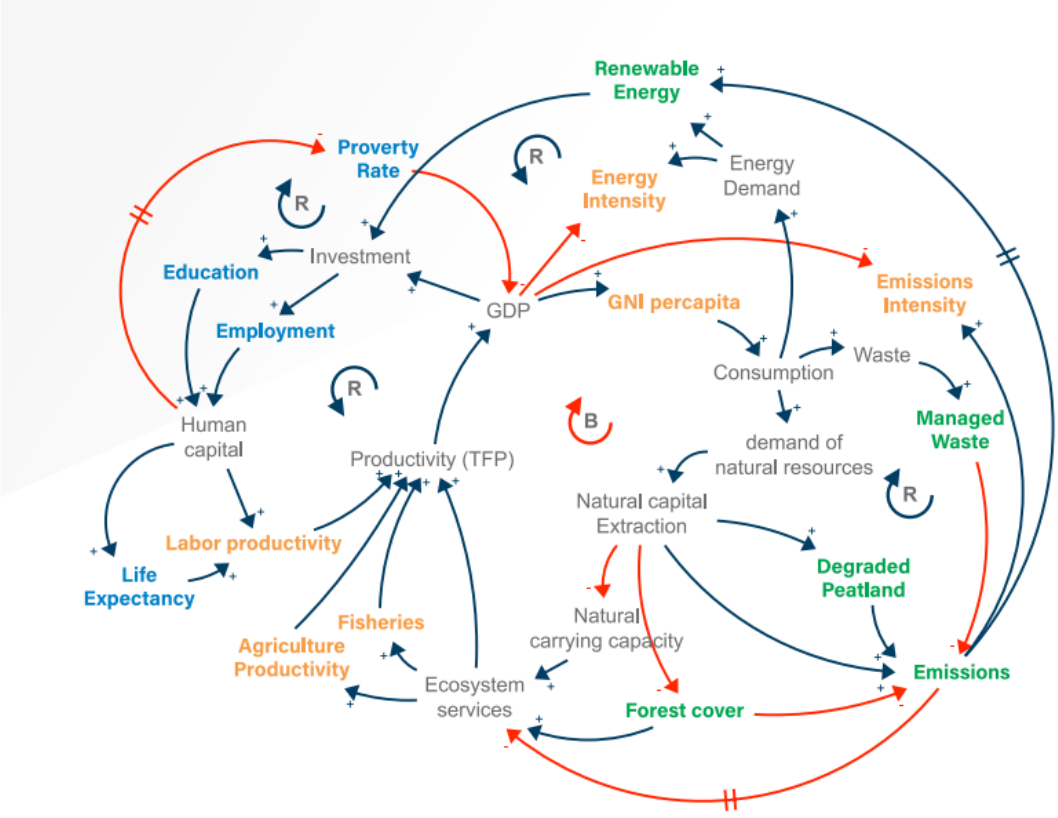
2.3. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (IEH) dikembangkan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja pembangunan hijau di suatu wilayah. Di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan Laporan *Green Economy Index* sebagai acuan penyusunan Indeks Ekonomi Hijau. Indeks Ekonomi Hijau merupakan suatu indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi ekonomi hijau, khususnya di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan multidimensional meliputi keterkaitan antara lingkungan, ekonomi, dan juga sosial (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Bappenas menyusun indeks ini mengacu kepada indeks ataupun studi terkait ekonomi hijau yang telah disusun oleh lembaga – lembaga internasional seperti UNEP, UNPAGE, dan OECD. Indikator – indikator yang digunakan untuk mengukur IEH dirumuskan berdasarkan kriteria:

1. Ketersediaan data teknis meliputi data historis maupun proyeksi yang disusun untuk memastikan kebermanfaatan indeks ini secara berkelanjutan.
2. Data – data tersebut dipilih berdasarkan ada atau tidaknya tujuan yang memiliki karakteristik SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*).

Berdasarkan referensi dan juga indikator tersebut, maka Bappenas merumuskan terdapat 15 indikator yang digunakan dalam perhitungan IEH. Adapun untuk memahami keterkaitan antar pilar (lingkungan, ekonomi, dan sosial), Bappenas merumuskan suatu model sistem dinamis yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. Berdasarkan gambar tersebut, garis berwarna hijau menggambarkan indikator – indikator lingkungan, warna kuning menggambarkan indikator – indikator ekonomi, dan warna biru menggambarkan indikator – indikator sosial. Jika diperhatikan, garis – garis tersebut menunjukkan keterkaitan antar indikator yang bukan hanya berpengaruh untuk masing – masing pilar

saja tetapi juga berpengaruh lintas pilar. Misalkan, pertumbuhan PDB (GDP) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PNB (GNI) per kapita yang akan menyebabkan tingkat konsumsi meningkat dan juga mendorong peningkatan energi untuk memenuhi permintaan tersebut. Peningkatan permintaan energi tersebut memberikan peluang terhadap peningkatan penggunaan energi terbarukan, yang mana meningkatkan pangsa energi terbarukan dan investasi hijau. Hal tersebut dapat dilanjutkan lagi dengan peningkatan pada sektor ketenagakerjaan dan pendidikan yang mana mampu meningkatkan modal manusia (*human capital*) yang akan meningkatkan harapan hidup dan juga produktivitas tenaga kerja yang akan kembali lagi kepada peningkatan PDB (GDP). Siklus ini akan terus berulang dan berlaku sama untuk indikator – indikator lainnya yang menunjukkan bagaimana implementasi ekonomi hijau ini sangat berdampak baik bagi pembangunan di Indonesia.



Sumber: Bappenas, 2022

Gambar 2.3 Keterkaitan Antar Pilar dan Indikator – Indikator IEH

IEH menggambarkan progres pencapaian relatif Indonesia dalam mencapai target minimum (*minimum threshold*) dan kondisi ideal (*maximum threshold*) dari masing – masing indikator. Ambang batas minimum maupun maksimum dari IEH yang disusun oleh Bappenas bermuara pada target NZE 2045, Visi Indonesia 2045, dan Bank Dunia. 15 indikator dalam IEH dikategorikan ke dalam tiga pilar, yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Adapun masing – masing penjelasan indikator IEH dapat dilihat pada tabel – tabel berikut.

Tabel 2-1 Indikator Pilar Lingkungan

No	Indikator	Keterangan	Nilai Minimum	Target
1	Tutupan Lahan Hutan	Perbandingan antara tutupan lahan hutan dengan total lahan	30%	54%
2	Kontribusi Energi Terbarukan	Kontribusi dari energi terbarukan terhadap seluruh energi yang digunakan	0%	42%
3	Sampah yang terkelola	Tingkat sampah rumah tangga yang dikelola oleh pemerintah	0%	82%
4	Persentase reduksi emisi gas rumah kaca	Tingkat emisi yang berkurang dari semua sektor	0%	70%
5	Persentase penurunan kerusakan lahan gambut	Perbandingan antara tutupan lahan hutan pada lahan gambut terhadap total lahan gambut	30%	0%

Sumber: Bappenas, 2022

Tabel 2-2 Indikator Pilar Ekonomi

No	Indikator	Keterangan	Nilai Minimum	Target
6	Intensitas Emisi	Rasio emisi GRK per unit aktivitas ekonomi terhadap PDRB	270 TCO_2eq/BnRp	26 TCO_2eq/BnRp
7	Intensitas Energi Final	Jumlah energi yang digunakan pada aktivitas ekonomi terhadap PDRB	125 BOE/BnRp	63 BOE/BnRp

No	Indikator	Keterangan	Nilai Minimum	Target
8	Pendapatan Nasional Bruto (GNI)	seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang	500 USD	12.695 USD
9	Produktivitas Agrikultur	Minimum jumlah panen tanaman pangan di Indonesia pada indeks pangan terendah (jumlah panen/area tanam)	5 ton/ha/tahun	12 ton/ha/tahun
		Produksi minyak sawit mentah pada basis ekspor	2 ton/ha/tahun	5 ton/ha/tahun
		Produksi akuakultur di Indonesia	3 ton/ha/tahun	19 ton/ha/tahun
10	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	Kemampuan tenaga kerja untuk produktif di sektor industri	20 Juta Rp/orang/tahun	200 Juta Rp/orang/tahun
11	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	Kemampuan tenaga kerja untuk produktif di sektor jasa	20 Juta Rp/orang	200 Juta Rp/orang

Sumber: Bappenas, 2022

Tabel 2-3 Indikator Pilar Sosial

No	Indikator	Keterangan	Nilai Minimum	Target
12	Rata Rata Lama Sekolah	Total tahun pendidikan untuk usia dewasa dibagi total penduduk usia dewasa	2 tahun	12 tahun
13	Harapan Hidup	Rata – rata tahun harapan penduduk untuk hidup	55 tahun	75,5 tahun
14	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	13%	0%
15	Tingkat Pengangguran	Persentase masyarakat yang menganggur dalam angkatan kerja	15%	3%

2.4. Tinjauan Kebijakan

Terdapat beberapa kebijakan yang relevan dengan ekonomi hijau terutama terkait dengan rencana pembangunan yang mana relevansinya adalah mengaitkan antara implementasi Indeks Ekonomi Hijau ini dengan target – target pembangunan di Indonesia maupun Kabupaten Tangerang.

2.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045

Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 – 2045 secara eksplisit menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lima sasaran utama yaitu:

1. Pendapatan per Kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

Jika dipetakan, maka pemetaan antara Visi Indonesia Emas 2045 dengan sasaran visi dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: RPJPN 2025 – 2045

Gambar 2.4 Pemetaan Visi Indonesia 2045 dengan Sasaran Visi

Kemudian, dari visi tersebut maka dirumuskan kembali misi (agenda) pembangunan yang berupa

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata kelola
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesinambungan pembangunan

Ekonomi hijau secara eksplisit dijelaskan dalam transformasi ekonomi yang mana dalam dokumen RPJMN, transformasi ekonomi dijelaskan sebagai berikut:

> *"Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN),* ***penerapan ekonomi hijau****, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi."*

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam (island grid) dan antar pulau (national grid) serta sistem terisolasi

(isolated grid); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (battery/energy storage system); (v) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular; (vii) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan; (viii) Penguatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau, serta (ix) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor. Adapun target Pemerintah terkait dengan penerapan ekonomi hijau ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2-4 Indikator Capaian Penerapan Ekonomi Hijau dalam RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045

Arah (tujuan pembangunan)	Indikator	*Baseline* 2025	Target 2045
Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat penerapan ekonomi hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau (IEH)	70,80	90,65
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70

Sumber: RPJPN 2025 – 2045

2.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029

RPJMN 2025 – 2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJPN yang mana dinilai sebagai tonggak awal dari keberhasilan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan pada Tahap I RPJPN 2025 – 2045 diarahkan kepada penguatan transformasi – transformasi yang ditetapkan dalam misi pembangunan jangka panjang Indonesia yang dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2.5 Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025 – 2045 Tahap I

Dapat dilihat bahwa dalam rangka penguatan transformasi ekonomi, Pemerintah Indonesia berencana mewujudkan hal tersebut diantaranya dengan pelaksanaan transisi energi tahap pertama dalam rangka pencapaian penerapan ekonomi hijau. Visi Presiden periode 2025 – 2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut kemudian dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang tertuang di dalam Delapan Asta Cita yang diterjemahkan menjadi 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) 2025

– 2029. Dari delapan prioritas tersebut, Prioritas Nasional 2 yang berbunyi "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, **ekonomi hijau**, dan ekonomi biru". PN 2 tersebut berkaitan langsung dengan transformasi ekonomi yang tercantum dalam RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045. Adapun target Indeks Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025 – 2029 adalah 77,20 pada tahun 2029.

2.4.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang 2025 – 2029

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2025 – 2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing". Visi tersebut telah selaras dengan RPJM Nasional dan juga RPJMD Provinsi Banten, yaitu pembangunan yang maju dan berdaya saing yang berlandaskan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, visi tersebut diterjemahkan ke dalam enam Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 diantaranya:

1. Misi Pertama: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
2. Misi Kedua: Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing
3. Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas
4. Misi Keempat: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas
5. Misi Kelima: Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
6. Misi Keenam: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2029 tidak tercantum mengenai pencapaian Indeks Ekonomi Hijau secara langsung. Meskipun demikian, indikator – indikator pembentuk IEH sebagian sudah tercantum dalam Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2030, diantaranya:

Tabel 2-5 Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2030 yang Terkait dengan IEH

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan - Sasaran	*Baseline* 2024	Target 2030
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun)	75,34	82,63
	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatknya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,06	10,66
	Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu	Persentase RTH Kawasan Perkotaan (%)	-	25
	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	24,42

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang (diolah)

BAB III – METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam kajian Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Tangerang mencakup analisis kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meliputi 15 indikator di wilayah tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi hijau telah diterapkan di Kabupaten Tangerang dan untuk mengidentifikasi potensi serta isu-isu yang ada dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Tabel 3-1 Luas Wilayah Kabupaten Tangerang Per Kecamatan

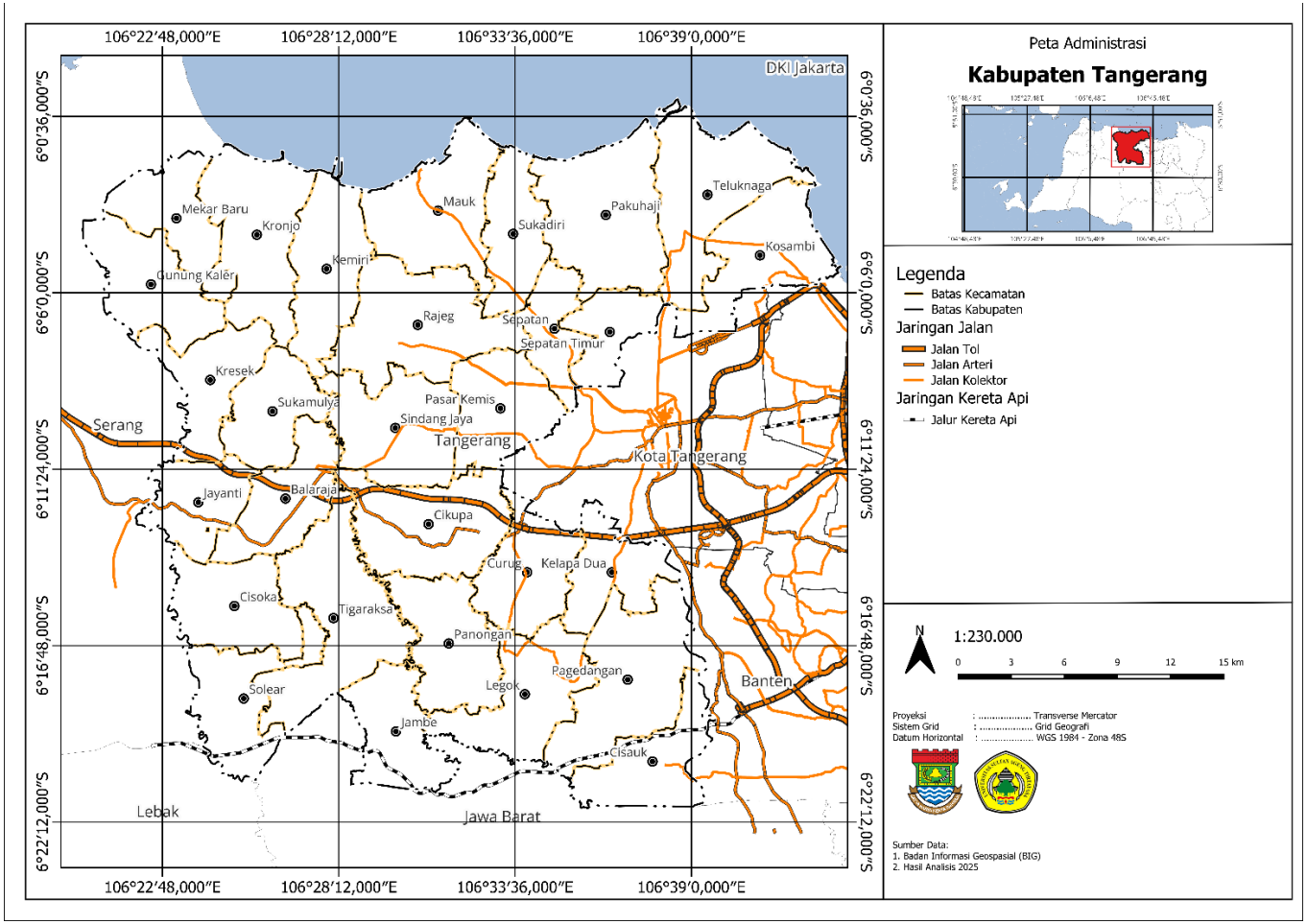
Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah
Cisoka	31,21	3,02
Solear	34,07	3,29
Tigaraksa	55,3	5,35
Jambe	28,25	2,73
Cikupa	46	4,45
Panongan	36,15	3,49
Curug	30,83	2,98
Kelapa Dua	26,22	2,53
Legok	37,28	3,6
Pagedangan	50,75	4,91
Cisauk	30,05	2,9
Pasarkemis	30,73	2,97
Sindang Jaya	41,39	4
Balaraja	32,3	3,12
Jayanti	24,88	2,4
Sukamulya	25,44	2,46
Kresek	29,99	2,9
Gunung Kaler	32,77	3,17
Kronjo	46,51	4,5
Mekar Baru	25,78	2,49
Mauk	44,94	4,34
Kemiri	33,45	3,23
Sukadiri	24,99	2,42

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah
Rajeg	53,3	5,15
Sepatan	19,22	1,86
Sepatan Timur	19,66	1,9
Pakuhaji	54,55	5,27
Teluknaga	52,41	5,07
Kosambi	36,09	3,49
Kab. Tangerang	**1034,54**	**100**

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024

Batas – batas wilayah Kabupaten Tangerang, diantaranya:

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Selatan: Kabupaten Lebak
- Sebelah Timur: Kabupaten Serang
- Sebelah Barat: Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Tangerang

3.2 Metode Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau

Metode yang digunakan untuk mengukur Indeks Ekonomi Hijau (IEH) merujuk pada penyusunan IEH yang telah disusun oleh Bappenas pada tahun 2022 melalui laporan *Green Economy Index: A Step Forward To Measure The Progress of Low Carbon & Green Economy in Indonesia*. Secara prinsip metode pengukuran IEH dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

3.2.1 Tahapan Penyusunan Kajian Indeks Ekonomi Hijau

1. Inventarisasi Data Indikator Ekonomi Hijau

   Mengumpulkan data dari instansi – instansi terkait, seperti BPS, DLHK, Disperindag, Disnakertrans, dan lain – lain terkait dengan data – data pilar lingkungan, ekonomi, dan juga sosial sebagaimana yang disusun oleh Bappenas dalam laporan *Green Economy Index*.
2. Pengolahan Data dan Informasi

   Mengelompokkan data – data yang telah dikumpulkan berdasarkan pilar dan indikator ekonomi hijau. Dalam tahapan ini juga, data – data kemudian disampaikan dalam bentuk – bentuk yang informatif seperti tabel maupun grafik. Selain itu, dalam tahapan ini juga terdapat pengolahan data spasial berupa peta dengan menggunakan *software* QGIS dan Earth Engine untuk mengumpulkan citra satelit Sentinel.
3. Analisa Data dan Informasi

   Menghasilkan Indeks Ekonomi Hijau berdasarkan kriteria dan perhitungan Bappenas dengan menyesuaikan kriteria – kriteria tersebut dengan data yang relevan untuk Kabupaten Tangerang.
4. Penyusunan Muatan Kajian Indeks Ekonomi Hijau Wilayah Kabupaten Tangerang

   Merumuskan profil ekonomi hijau, indeks ekonomi hijau, dan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Tangerang.

3.2.2 Metode Penyusunan Kajian Indeks Ekonomi Hijau

1. Survey Data Sekunder

   Mengumpulkan data secara sekunder kepada dinas – dinas dan lembaga terkait.

2. Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau (IEH)

   Perhitungan menggunakan perhitungan skor Indeks Ekonomi Hijau yang dirilis oleh Bappenas pada tahun 2022.

3.2.3 Penetapan Indikator Penyusun IEH Kabupaten Tangerang

Kriteria yang disusun oleh Bappenas merupakan indikator ekonomi hijau yang disesuaikan untuk skala nasional. Oleh karena itu, terdapat beberapa data yang bersifat nasional seperti data tutupan lahan hutan yang akan disubstitusikan dengan rasio RTH Publik, Pendapatan Nasional Bruto (GNI) yang akan disesuaikan menjadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang dikarenakan tidak ada metode langsung untuk menghitung GNI per kabupaten, dan produktivitas agrikultur yang akan secara spesifik merujuk pada hasil panen padi/hektar. Penyesuaian tersebut dinilai relevan dengan konteks dan ketersediaan data yang ada di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, kriteria penyusunan IEH di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-2 Penyesuaian Kriteria Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang

No	Indikator	Nilai Minimum		Target	
		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan
1	Rasio RTH Publik	30%	%	54%	%
2	Kontribusi Energi Terbarukan	0%	%	42%	%
3	Sampah yang terkelola	0%	%	82%	%
4	Persentase reduksi emisi gas rumah kaca	0%	%	70%	%
5	Persentase penurunan lahan gambut	30%	%	0%	%
6	Intensitas Emisi	270	TCO_2eq/BnRp	26	TCO_2eq/BnRp
7	Intensitas Energi Final	125	BOE/BnRp	63	BOE/BnRp
8	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	500	USD	12695	USD
9	Produktivitas Tanaman Padi	5	ton/ha/tahun	12	ton/ha/tahun
10	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	20	Juta Rp/orang/tahun	200	Juta Rp/orang/tahun

No	Indikator	Nilai Minimum		Target	
		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan
11	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	20	Juta Rp/orang	200	Juta Rp/orang
12	Rata Rata Lama Sekolah	2	tahun	12	tahun
13	Harapan Hidup	55	tahun	75,5	tahun
14	Tingkat Kemiskinan	13,00	%	0,00	%
15	Tingkat Pengangguran	15,00	%	3,00	%

Sumber: Green Economy Index (diolah)

3.2.4 Metode Penyusunan Kajian IEH

Berdasarkan laporan *Green Economy Index*, tahapan perhitungan IEH dimulai dari perhitungan skor masing – masing indikator. Cara perhitungan skor indikator sama untuk semua indikator. Perhitungan skor indikator tersebut dilakukan dengan cara membagi antara selisih data eksisting dan nilai minimum dengan selisih nilai target dan nilai minimum kemudian dikalikan 100. Rumus perhitungan skor indikator dapat dilihat sebagai berikut.

- Skor Indikator (i) $= \frac{(y^{i} - y^{min})}{(y^{max} - y^{min})} \times 100$

  y^{i} = nilai indikator pada tahun tertentu

  y^{min} = ambang batas terendah dari indikator

  y^{max} = target dari indikator

Kemudian, indikator – indikator tersebut dijumlahkan sesuai dengan kelompok pilar dari indikator – indikator tersebut sehingga terdapat tiga cara perhitungan, yaitu skor lingkungan, skor ekonomi, dan skor sosial. Perhitungan skor pilar adalah dengan menjumlahkan seluruh skor indikator sesuai dengan pilarnya kemudian dibagi dengan jumlah indikator pilar.

- $Skor\ Lingkungan\ (i) = \frac{\sum_{j=1}^{5} Skor\ Indikator}{5}$
- $Skor\ Ekonomi\ (i) = \frac{\sum_{j=6}^{11} Skor\ Indikator}{6}$
- $Skor\ Sosial\ (i) = \frac{\sum_{j=12}^{15} Skor\ Indikator}{4}$

Langkah terakhir adalah menghitung IEH, caranya adalah menjumlahkan seluruh perkalian antara skor pilar dengan masing – masing jumlah indikator yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan 15 (jumlah seluruh indikator).

- $Indeks\ Ekonomi\ Hijau\ (i) = \frac{(\boldsymbol{Skor\ Lingkungan} \times \mathbf{5}) + (\boldsymbol{Skor\ Ekonomi} \times \mathbf{6}) + (\boldsymbol{Skor\ Sosial} \times \mathbf{4})}{\mathbf{15}}$

Nilai akhir dari IEH Wilayah berada pada rentang 0 -100 dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3-3 Kriteria Skor Indeks Ekonomi Hijau

Kategori	Rentang Skor
Kurang	0,00 – 25,00
Sedang *tier* 1	25,01 – 37,50
Sedang *tier* 2	37,51 – 50,00
Baik *tier 1*	50,01 – 62,50
Baik *tier 2*	62,51 – 75,00
Sangat baik	75,01 – 100

3.2.5 Penyusunan Rekomendasi

Langkah terakhir setelah perhitungan IEH adalah penyusunan rekomendasi terkait peningkatan ekonomi hijau di Kabupaten Tangerang. Rekomendasi ini disusun berdasarkan tren nilai IEH Kabupaten Tangerang yang dihitung mulai dari tahun 2020 – 2024. Penyusunan bersifat deskriptif naratif yang juga didasarkan dengan kebijakan – kebijakan eksisting di Kabupaten Tangerang seperti RPJMD Kabupaten Tangerang, RTRW Kabupaten Tangerang, dan lain – lain.

BAB IV PROFIL WILAYAH

4.1 Profil Umum Wilayah Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki luas sekitar 1034,54 km^2 yang menjadikan Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten terluas keempat di Provinsi Banten. Terdapat 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang yang mana secara karakteristik geografis terdiri atas dataran tinggi di bagian tengah hingga selatan dan dataran rendah di kawasan utaranya. Wilayah Kabupaten Tangerang berada di koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 6°00'-6°21' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tangerang terletak yang strategis, berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Kabupaten Tangerang juga dilintasi oleh jalur utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra yang memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik, ditandai dengan wilayah yang dilalui oleh Jalan Tol Merak-Jakarta, akses *double track* kereta api, hingga menjadi jalan alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah penyangga bagi Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menciptakan interaksi antar wilayah yang dapat menumbuhkan fenomena interdependensi. Fenomena tersebut mampu memicu pertumbuhan wilayah, *backwash effect,* dan *trickling down* yang membentuk hubungan sinergis antar daerah. Kabupaten Tangerang tumbuh cepat melalui penyediaan infrastruktur, pusat kegiatan, dan permukiman.

4.1.1 Topologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 0-3%. Wilayah dengan dataran rendah berada di sisi utara Kabupaten Tangerang. Selain itu, terdapat wilayah dataran tinggi yang berada di bagian tengah ke arah selatan dengan kemiringan tanah rata-rata 0-8% menurun ke arah utara. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Tangerang didominasi dengan ketinggian wilayah 0-25 mdpl yang tersebar pada bagian wilayah Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Gunung Kaler, Kronjo, Mekarbaru, Pakuhaji, Sepatan dan

Sepatan Timur. Sementara itu, pada sisi utara Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir yang memiliki garis pantai sepanjang ±50 km.

4.1.2 Geologi

Kabupaten Tangerang memiliki struktur batuan yang terbentuk dari alluvium meliputi lempung, kerikil, dan kerakal serta Tuff Banten (Banten Tuff) yang terdiri atas batu apung dan batu pasir tufaan. Wilayah utara Kabupaten Tangerang adalah daerah dengan keadaan bergelombang lemah, yang termasuk dalam kategori lahan bentukan asal pengendapan atau berjenis aluvial. Secara umum, jenis tanah di wilayah ini terdiri atas aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecokelatan, podsolik kuning, asosiasi podsolik kuning, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu yang kaya akan zat hara sehingga membuka peluang pengembangan pertanian dan budidaya. Jenis tanah tersebut terbentuk melalui proses pengendapan dalam sungai dan danau di daerah dataran dan cekungan. Selain itu, di wilayah dataran rendah juga dapat ditemukan jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik.

Karakteristik jenis tanah di wilayah Kabupaten Tangerang ini memiliki tekstur tanah yang didominasi oleh tekstur halus dan tekstur sedang. Namun, juga terdapat tekstur kasar seluas 3.553 Ha. Berdasarkan teksturnya, tanah di wilayah ini sangat cocok untuk digunakan sebagai kawasan budidaya pertanian dan tanaman keras

4.1.3 Hidrologi

Sumber daya air Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air permukaan dan air tanah. Wilayah Kabupaten Tangerang potensi cadangan air tanah yang tinggi, meskipun di Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga, dan Kosambi mengalami intrusi air laut dan eksploitasi untuk kegiatan industri. Sementara itu, sumber air permukaan berasal dari aliran sungai yang memiliki debit relatif tinggi meski berfluktuasi pada musim kemarau. Namun demikian, kualitas air yang berasal dari aliran sungai ini mulai menurun karena pencemaran yang merupakan akibat dari kegiatan sehari-hari masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Kondisi pencemaran tersebut juga

memerlukan perhatian khusus karena tingginya pertumbuhan penduduk dan kegiatan masyarakat dapat berakibat pada peningkatan kebutuhan air.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, Kabupaten Tangerang memiliki kawasan resapan air seluas 1.555 Ha yang meliputi daerah aliran sungai Cidurian, Ciujung, Cubareo, dan Cimanceuri. Keempat DAS tersebut keberadaannya harus dijaga untuk menjaga keseimbangan alam dan ketersediaan air di wilayah ini. Sumber air permukaan di wilayah ini terdiri atas sungai, situ, rawa, ataupun embung. Wilayah Kabupaten Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yang membentuk daerah aliran sungai yang cukup luas. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Cisadane dengan debit tahunan mencapai 77.644 m^3/detik, Sungai Cidurian dengan debit maksimum pada 1999 mencapai 21 m^3/detik, dan Sungai Cimanceuri dengan debit rata-rata hingga 9,3042 L/detik. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 38 sungai kecil yang melintas di wilayah ini. Sumber air lain yang dimanfaatkan adalah situ dan rawa. Kabupaten Tangerang memiliki 6 situ dan 12 rawa yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain itu, terdapat juga sumber air baku permukaan lain, yaitu Embung Gagak dan Embung Cigarukgak. Embung Gagak seluas 86.460 m^2 di Kampung Kebon Cabe Desa Gagak Kecamatan Pakuhaji yang memiliki debit hingga 45.5 L/detik. Sementara itu, Embung Cigarukgak di Desa Kemuning Kecamatan Kresek memiliki luas 1.770.000 m^2 dan mampu menghasilkan air dengan debit hingga 180 L/detik. Kedua embung tersebut memiliki peran sebagai pengelola air hujan dan sumber air di wilayah sekitar.

Berdasarkan data dari hasil kajian RISPAM, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai potensi cadangan air tanah dengan debit 3 -10 L/detik/Km^2. Selain itu, wilayah ini juga memiliki lima cekungan air bawah tanah (CABT) yang sangat potensial untuk dimanfaatkan, yaitu potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m^3/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m^3/tahun. Namun demikian, akibat penggunaan yang dilakukan oleh pelaku industri, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri untuk menjaga cadangan air di wilayah Kabupaten Tangerang.

4.1.4 Topologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan rata-rata temperatur suhu yang cenderung sedang dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sementara itu, jumlah curah hujan di wilayah ini berkisar pada 60,10 - 613,00 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 14 sampai 31 hari dalam satu bulan. Adapun jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember.

Tabel 4-1 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	322,60	21	3,30
Februari	191,00	19	2,50
Maret	149,50	23	3,70
April	483,60	27	3,70
Mei	102,60	14	2,80
Juni	123,40	15	4,00
Juli	88,70	28	3,60
Agustus	234,80	31	5,70
September	76,50	30	5,50
Oktober	60,10	31	5,60
November	613,00	30	3,90
Desember	218,90	31	2,00

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata temperatur di wilayah ini berkisar antara 26,46 - 28,22°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai suhu 37,30°C dan temperatur terendah mencapai 20,40°C.

Tabel 4-2 Kondisi Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2024

c	Suhu (°C)		
	Minimum	Rata - Rata	Maksimum
Januari	23,10	27,08	34,90
Februari	22,80	27,28	35,20
Maret	21,40	27,05	34,40
April	23,00	27,58	35,60
Mei	23,40	28,22	35,40
Juni	22,00	27,48	34,80
Juli	19,70	26,46	34,20
Agustus	20,80	27,33	34,80
September	21,30	27,59	36,30
Oktober	20,40	28,10	37,30
November	22,30	27,26	34,90
Desember	22,60	26,93	33,60

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata kelembapan di wilayah ini berkisar antara 74,27 – 86,54%. Kelembapan maksimum di wilayah ini mencapai 100% yang terjadi di bulan Januari. Sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan Oktober.

Tabel 4-3 Kondisi Kelembapan

Bulan	Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata - Rata	Maksimum
Januari	53,00	85,06	100,00
Februari	45,00	85,08	99,00
Maret	48,00	86,23	99,00
April	42,00	86,54	99,00
Mei	45,00	82,52	99,00
Juni	40,00	82,56	99,00
Juli	55,00	81,42	98,00
Agustus	70,25	76,91	88,50
September	66,75	77,10	92,25
Oktober	61,75	74,27	85,25
November	63,00	83,15	92,75
Desember	69,25	83,15	95,50

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

4.1.5 Penggunaan Lahan

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian berupa sawah irigasi sebesar 50.709,86 Ha atau 49,52%. Sementara itu, wilayah terbangun di Kabupaten Tangerang didominasi oleh kawasan permukiman, baik permukiman perkotaan maupun permukiman perkotaan seluas 18.426,6 Ha atau 18%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menyebabkan tingginya alih fungsi lahan di wilayah ini. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri utamanya menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah.

Tabel 4-4 Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang

No	Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	57.431	56,08
2	Kebun Campuran	16.835	16,44
3	Perkampungan	14.874	14,52
4	Perairan Darat	5.919	5,78
5	Perkebunan	2.183	2,13
6	Tegalan/Ladang	2.049	2
7	Jasa, Industri, dan Pergudangan	1.785	1,74

No	Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
8	Sungai/Danau	1.126	1,1
9	Pertambangan	111	0,11
10	Tanah Terbuka	93	0,09
11	Padang	8	0,01

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahung 2025 – 2029

4.1.6 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung

1. Kapasitas D3TLH Penyediaan Pangan

   Daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan dalam pemanfaatan ruang difokuskan pada kawasan budidaya pertanian pangan. Ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, serta peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi yang mengurangi kualitas lingkungan. Analisis daya dukung dan daya tampung pangan dilakukan dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta status ambang batas daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah. Hasil analisis menunjukkan Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan daya dukung lahan, dengan 97.944,52 Ha atau 96% lahan terlampaui yang menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan penduduk.

2. Daya Dukung Daya Tampung Air

   Air adalah sumber daya alam esensial yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta perlu dijaga keberlanjutannya. Daya dukung dan daya tampung air ini ditentukan oleh kinerja jasa lingkungan hidup yang mencakup bentang alam, vegetasi alami, dan penutupan lahan. Daya dukung dan daya tampung air dipengaruhi oleh ketersediaan dan kebutuhan air. Saat ini, ketersediaan air di wilayah tersebut mencapai 1.123.896.242,78 m^3/tahun, sementara kebutuhan air mencapai 1.797.028.714,27 m^3/tahun. Ketersediaan maupun kemampuan lahan dalam penyediaan air didominasi oleh lahan yang telah terlampaui seluas 84.338,35 hektar atau 83% dari total luas daerah yang menunjukkan lahan tersebut berada dalam kategori krisis air, terutama di wilayah utara dan barat.

4.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan wilayah yang terdiri atas kawasan hutan lindung dengan luas 1.555,32 Ha yang meliputi Kecamatan Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Kecamatan, dan Kosambi serta kawasan resapan air dengan luas 1.555 Ha yang berada di hulu DAS Cidurian, Ciujung, Cibareo, dan Cimanceuri. Sementara itu, kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai (325 Ha), sempadan sungai (559 Ha), dan kawasan sekitar situ/danau atau waduk (310 Ha). Adapun kawasan cagar budaya tersebar dalam 19 lokasi.

Kawasan peruntukan budidaya di Kabupaten Tangerang terdiri atas 8 (delapan) kawasan yang meliputi kawasan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, serta transportasi. Kawasan pertanian terdiri atas 14.094 Ha kawasan tanaman pangan dan 49 Ha kawasan peternakan. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap dan 151 Ha kawasan perikanan budidaya. Selanjutnya, kawasan pertambangan dan energi terdiri atas kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 95 Ha. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Tangerang memiliki luas 14.878 Ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Adapun peruntukan pariwisata Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 3 yakni pariwisata alam, budaya, dan buatan. Kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 2 yakni kawasan permukiman perkotaan dengan luas 66.543 Ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 2.900 Ha.

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki berbagai potensi pengembangan wilayah. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang, wilayah Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk direncanakan sebagai

kawasan strategis *dryport* dengan kegiatan utama meliputi transportasi dan pergudangan. Selain itu, kawasan reklamasi seluas 9.000 Ha di pantai utara direncanakan dikembangkan sebagai kawasan perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri.

4.1.8 Wilayah Rawan Bencana

1. Kebencanaan

Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi, terutama terkait gempa bumi. Selain itu terdapat beberapa potensi kebencanaan seperti tsunami, banjir, dan kekeringan. Gempa bumi berpotensi terjadi di seluruh wilayah, sementara tsunami mengancam pesisir pantai utara, seperti Kecamatan Kronjo, Kemeri, dan Mauk. Banjir rob dan kekeringan juga menjadi ancaman, dipicu oleh perubahan siklus iklim global. Berdasarkan data InaRisk 2023, tingkat kebencanaan di Kabupaten Tangerang dikategorikan dalam tiga kelas bahaya: rendah, sedang, dan tinggi, yang mencakup bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan, likuefaksi, tsunami, dan abrasi.

- Bencana Banjir

  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya banjir dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa sebagian besar wilayah memiliki dampak dan risiko bahaya banjir dengan klasifikasi tinggi seluas 34.891,52 hektar yang cenderung berdampak pada kawasan permukiman perkotaan mencapai 17.372,71 hektar. Selain itu bahaya banjir juga berdampak pada kawasan tanaman pangan dan kawasan peruntukan industri.
- Bencana Banjir Bandang

  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya banjir bandang dengan pola ruang, diketahui bahwa Kabupaten Tangerang memiliki dampak dan risiko bahaya banjir bandang dengan klasifikasi tinggi seluas 142,86 hektar, sedang seluas 90,42 hektar, dan rendah seluas 27,61 hektar dengan kecenderungan berdampak pada kawasan permukiman perkotaan seluas 76,87 hektar.

- Bencana Cuaca Ekstrem

  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya cuaca ekstrem dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman perkotaan akan sangat terdampak dari adanya potensi bahaya cuaca ekstrem dengan luas 65.928,34 hektar, diikuti kawasan peruntukan industri dan kawasan tanaman pangan.

- Bencana Gelombang Ekstrem

  Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir di wilayah utara yang berpotensi mengalami bahaya gelombang ekstrem. Dampak dari potensi gelombang ekstrem dan abrasi paling besar terjadi di kawasan lindung dengan klasifikasi rendah yang luasnya mencapai 291,66 hektar, sedangkan dampak tertinggi terdapat di kawasan permukiman perdesaan seluas 83,92 hektar.

- Bencana Gempa Bumi

  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya gempa bumi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa wilayah yang terdampak dengan status bahaya gempa bumi tinggi memiliki luasan paling kecil. Sebagian besar berada dalam kondisi bahaya gempa bumi rendah hingga sedang, terutama kawasan permukiman perkotaan yang memiliki klasifikasi sedang mencakup area seluas 48.136,67 hektar.

- Bencana Kebakaran Hutan

  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya kebakaran hutan dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan industri memiliki nilai bahaya tinggi mencapai 8,76, sementara sebagian besar area yang terdampak berada pada klasifikasi bahaya rendah hingga sedang, termasuk kawasan permukiman dan perkotaan.

- Bencana Likuefaksi

  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya likuefaksi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman perkotaan memiliki luas terbesar dalam klasifikasi bahaya sedang, yaitu 25.378,40 hektar. Sementara itu, sebagian besar kawasan lainnya juga berada dalam klasifikasi bahaya sedang.

- Bencana Tsunami

  Secara administratif, wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir dengan risiko tsunami yang relatif rendah. Berdasarkan analisis, kawasan yang terdampak memiliki klasifikasi indeks bahaya rendah. Namun, ada beberapa area yang terkena dampak cukup luas, seperti kawasan hutan lindung seluas 341,79 hektar dan kawasan permukiman perkotaan seluas 264,55 hektar.

2. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

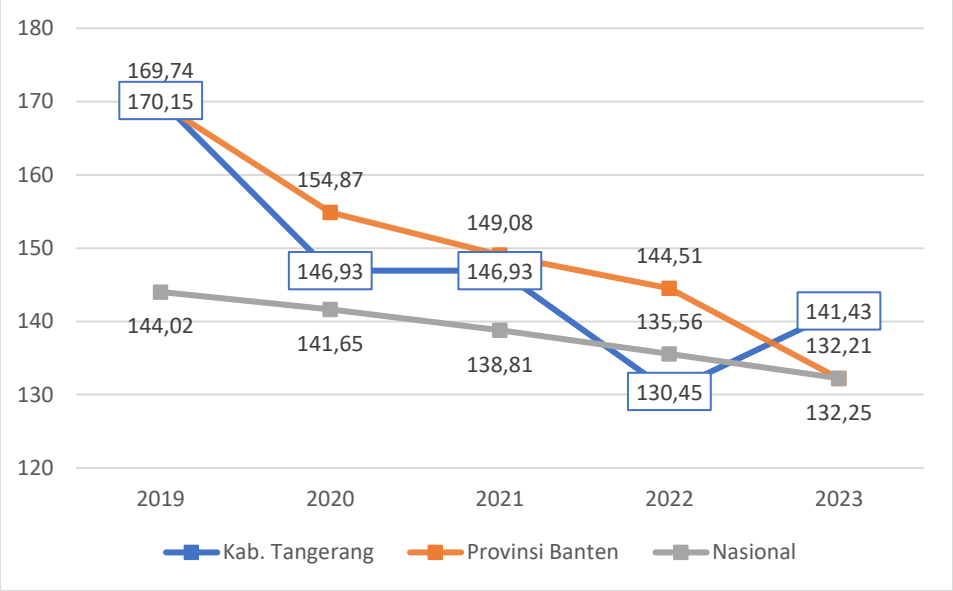
Pembangunan yang terus berkembang di Kabupaten Tangerang akan mempengaruhi lingkungan, terutama terkait dengan risiko bencana sehingga diperlukan *overlay* bahaya bencana dengan pola dan struktur ruang. Saat ini, perkembangan pola ruang di Kabupaten Tangerang akan sangat dipengaruhi oleh pembangunan tersebut, dan beberapa proyek pembangunan diproyeksikan akan terpengaruh oleh perubahan dalam pola ruang.

Selain itu, bencana kebakaran sering terjadi di kawasan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan yang tidak tertata. Bencana angin puting beliung kerap melanda Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, Kresek, Jayanti, Solear, Mauk, Sukadiri, Panongan, Cisoka, Tigaraksa, Jambe, dan Legok. Selain itu, ada wilayah yang rawan bencana banjir di Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Di bagian utara Kabupaten Tangerang, terdapat area yang rentan terhadap erosi atau abrasi akibat gelombang laut, seperti di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo.

4.1.9 Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang memiliki kerawanan bencana pada beberapa jenis bencana. Bencana kebakaran rawan terjadi pada kawasan peruntukan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan tidak tertata. Bencana angin puting beliung juga rawan terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, banjir dapat diakibatkan oleh pasang surut di kawasan pesisir dan banjir akibat luapan aliran sungai Kecamatan

Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Sedangkan bencana kekeringan juga rawan terjadi pada musim kemarau.



Gambar 4.1 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2029

4.2 Kondisi Demografi Kabupaten Tangerang

4.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 3.373.149 jiwa penduduk yang tersebar di 29 kecamatan. Kecamatan Pasar Kemis merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dari wilayah lain yakni dengan penduduk 258.477 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Mekar Baru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 44.942 jiwa/km^2. Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang memiliki tren peningkatan yang terjadi secara signifikan dengan laju pertumbuhan 1,93% per tahun dari tahun 2020-2024.

4.2.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kabupaten Tangerang memiliki kepadatan penduduk mencapai 3.260,53 jiwa/km^2 yang berarti tiap 1 km^2 wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3.260 jiwa penduduk. Kecamatan terpadat di wilayah ini adalah Kecamatan Pasar Kemis (8.411 jiwa/km^2),

Kecamatan Kelapa Dua (6.507 jiwa/Km^2), dan Kecamatan Sepatan (5.962 jiwa/km^2). Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kemiri dengan kepadatan 1.555 jiwa/km^2.

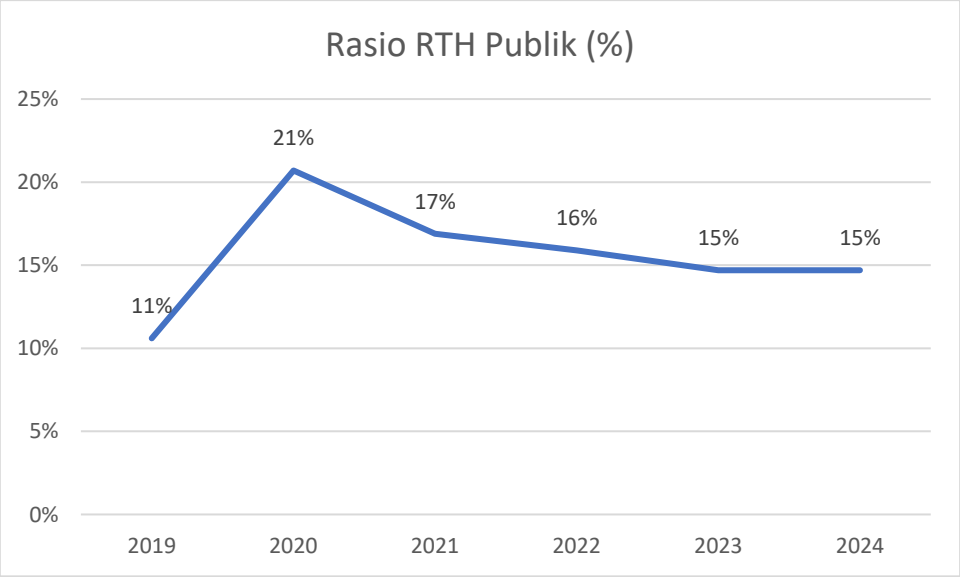
4.3 Gambaran Indikator IEH Kabupaten Tangerang

4.3.1 Pilar Lingkungan

Data mengenai pilar lingkungan meliputi rasio RTH, Kontribusi Energi Terbarukan, Sampah yang terkelola, persentase reduksi emisi gas rumah kaca, dan penurunan kerusakan lahan gambut.

1. Luas RTH Publik

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, tutupan luas hutan Kabupaten Tangerang diganti dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dikarenakan ketersediaan data *time series* tutupan lahan hutan yang terbatas. Namun, perubahan menjadi RTH Publik ini dinilai masih relevan dengan Indeks Ekonomi Hijau dikarenakan di dalam Undang – Undang Penataan Ruang pun diamanatkan mengenai minimum ketersediaan RTH sebesar 30%. Adapun ketersediaan RTH Publik di Kabupaten Tangerang dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.2 Rasio RTH Publik Kabupaten Tangerang 2019 – 2024

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2029

Terdapat tren yang fluktuatif yang mana hal tersebut terjadi seiring dengan pembangunan ekonomi yang memaksa terjadinya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan ruang merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di lapangan. Salah satu bentuk perubahan penggunaan ruang adalah berubahnya peruntukan ruang publik. Perubahan penggunaan ruang di Kabupaten Tangerang mencapai 1.838,90 Ha pada 2020. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 1.969,92 Ha. Hal ini dapat berdampak dan peningkatan kebutuhan ruang publik di Kabupaten Tangerang.

2. Energi Terbarukan

Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% pada kurun waktu 2019-2022. Persentase ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik PLN, listrik Non PLN dan bukan listrik. Pada tahun 2023, persentase listrik PLN mencapai 99,76%, listrik non PLN mencapai 0,02% dan bukan listrik 0,22%. Persentase ini mengindikasikan bahwa energi listrik yang dibutuhkan masyarakat sudah bisa ditanggung oleh PLN.

Tabel 4-5 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022

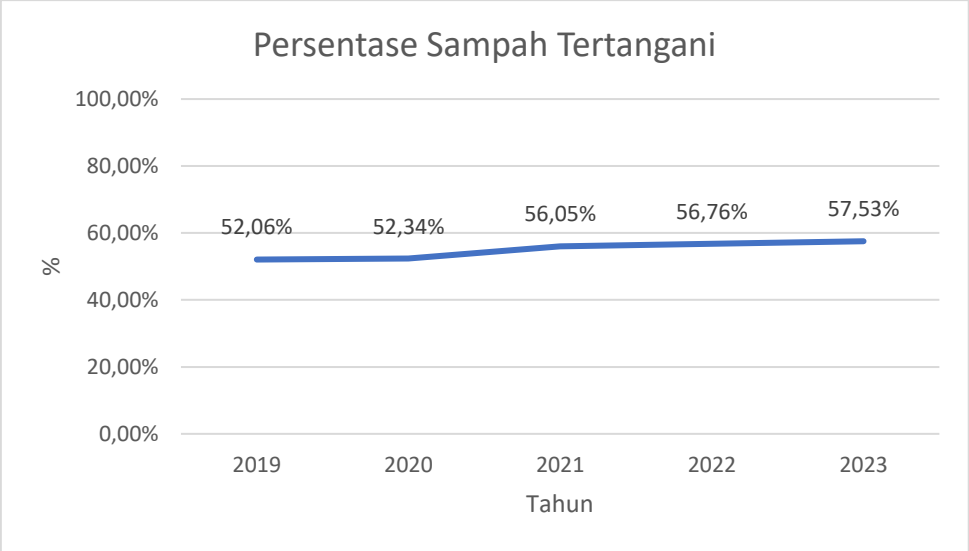
Jenis Listrik	2019	2020	2021	2022	2023
Listrik PLN	99,84%	99,23%	99,96%	99,94%	99,76%
Listrik Non-PLN	0,16%	0,77%	0,04%	0,06%	0,02%
Bukan Listrik	0	0	0	0	0,22%

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Penggunaan listrik per kapita menunjukkan konsumsi listrik dari aktivitas perekonomian, aktivitas rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, pelanggan listrik di Kabupaten Tangerang meningkat dengan rata-rata 11,9% per tahun. Hal ini selaras dengan penggunaan listrik yang juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk opimalisasi pemenuhan listrik serta transisi untuk penggunaan EBT sebagai sumber energi listrik alternatif di Kabupaten Tangerang.

3. Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), tren menunjukkan peningkatan persentase timbulan sampah yang terkelola di Kabupaten Tangerang dan pada tahun 2023 mencapai 57,53%. Akan tetapi, capaian ini masih jauh dari yang diharapkan 100% timbulan sampah yang terkelola.



Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2029

Gambar 4.3 Persentase Sampah Tertangani Kabupaten Tangerang 2019 – 2023

Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang dijelaskan bahwa rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah (tahun 2017-2019) stagnan pada angka 941 km2. Sementara itu dari sisi armada sampah yang dapat mengangkut 2.925 ton/hari atau 51% dari total sampah yang ada. Maka dari itu diperlukan langkah dalam penanganan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS 3R, hingga layanan persampahan skala regional yaitu TPA.

4. Emisi Gas Rumah Kaca

Belum terdapat data eksisting mengenai emisi gas rumah kaca di Kabupaten Tangerang. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyusun perencanaan terkait dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang 2025 – 2030. Rencana tersebut dicantumkan di dalam Misi Kepala Daerah: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dalam Tujuan Daerah: Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Kabupaten Tangerang merencanakan penurunan emisi GRK sebesar 8,9% pada tahun 2025, 12,01% di tahun 2026, 15,11% di tahun 2027, 18,22% di tahun 2028, 81,61% di tahun 2029, dan kondisi akhir yang diharapkan di tahun 2030 adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 82,49%.

Adapun permasalahan terkait dengan penurunan emisi GRK di Kabupaten Tangerang adalah belum optimalnya upaya untuk menurunkan GRK dan adaptasi mitigasi terhadap krisis iklim. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum optimalnya tata kelola dan manajemen dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), belum ketatnya regulasi dan pengawasan limbah industri, dan keterbatasan kapasitas untuk inovasi penanganan krisis iklim dan aksi penurunan GRK daerah.

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

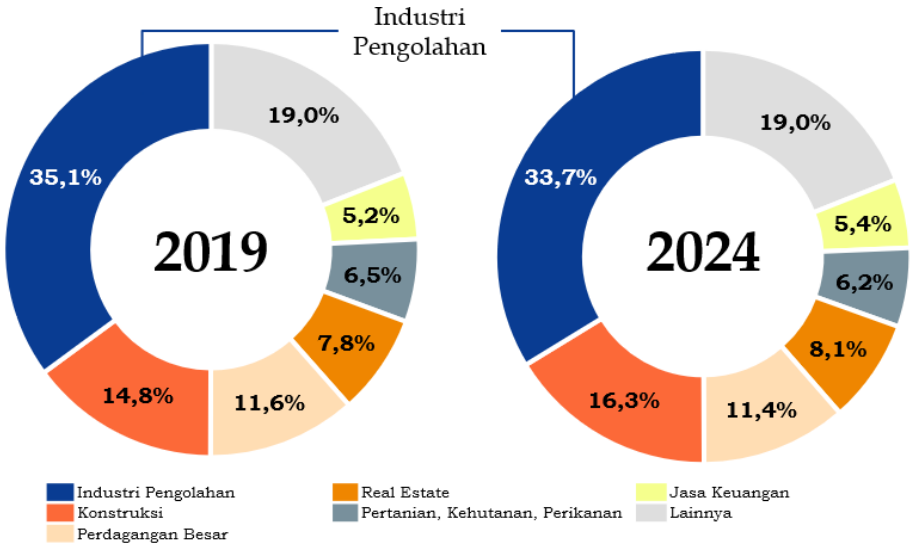
Pada tahun 2023, IKLH memiliki komponen perhitungan baru, yaitu (1) pada IKU berupa penambahan parameter PM 2.5; (2) pada IKA beruba perubahan petode perhitungan menjadi metode IKA-NA; serta (3) pada IKL berupa perubahan klasifikasi tutupan lahan dan memasukkan faktor koreksi lahan gambut. Dengan konversi rumus baru, capaian IKLH Kabupaten Tangerang adalah 61,07 dengan sub komponen IKU sebesar 68,56; IKA sebesar 61,46; serta IKL sebesar 46,54. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKLH Kabupaten Tangerang termasuk dalam ketiga terendah.

Berdasarkan dokumen Profil IKLH, dijabarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian IKLH Kabupaten Tangerang yaitu peningkatan pemantauan kualitas udara, meningkatkan pelayanan IPAL domestik dan industri, pemeliharaan tanaman mangrove, dan lain sebagainya. Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketahanan terhadap ancaman krisis iklim. Ancaman krisis iklim menjadi hal penting dalam arahan pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan berita menunjukkan ancaman krisis iklim di Kabupaten Tangerang yaitu El nino musim kemarau panjang dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir Tangerang.

4.3.2 Pilar Ekonomi

1. Perekonomian Wilayah Kabupaten Tangerang

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE. Capaian LPE tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro wilayah dari berbagai sektor. Pada tahun 2024, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian LPE Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga. Secara lebih detail, lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi (2024), yaitu Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya.



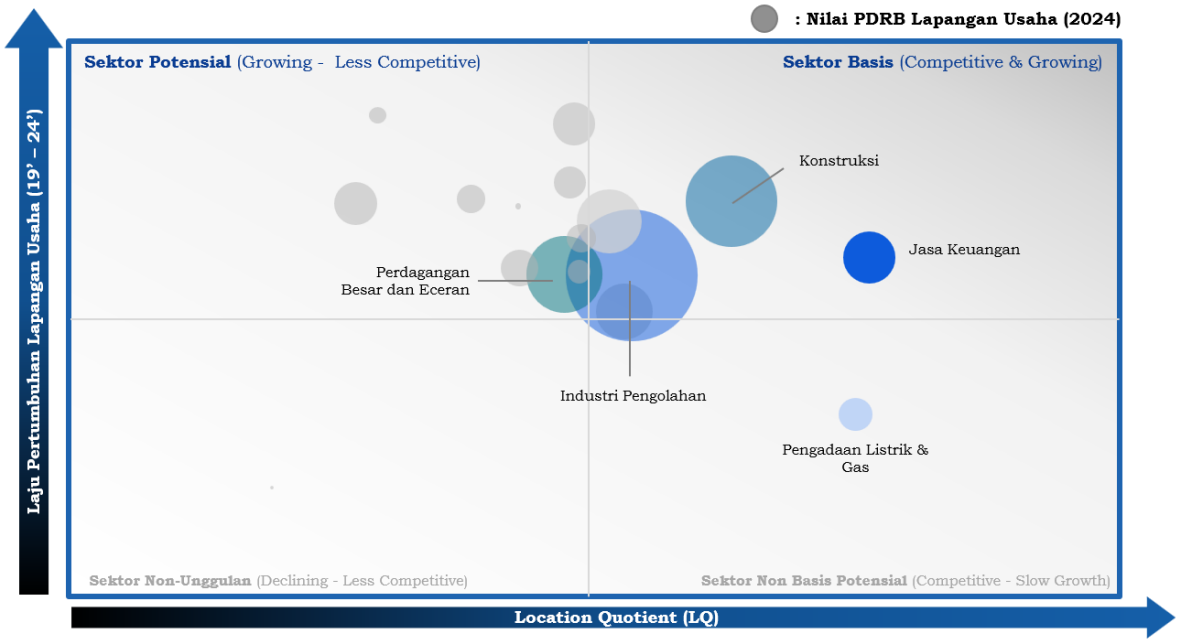
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2030

Gambar 4.4 Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024

Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 186.104,15 miliar rupiah. Kontribusi terbesar terhadap PDRB berasal dari lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 62.789,24 miliar rupiah atau sekitar 33,7% dari total PDRB. Sektor konstruksi menempati posisi kedua dengan nilai tambah sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3%), disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4%). Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor tersebut pada tahun 2019, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada sektor konstruksi dan real estate. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur dalam kurun lima tahun terakhir, baik yang merupakan proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol, perumahan berskala besar, maupun proyek strategis daerah yang mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan dan kawasan industri.

Peningkatan kontribusi sektor konstruksi dan real estate ini menunjukkan adanya dinamika struktur perekonomian Kabupaten Tangerang yang semakin didorong oleh aktivitas pembangunan fisik dan properti. Perkembangan ini tidak hanya berperan dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru serta menciptakan multiplier effect bagi sektor-sektor lain, seperti perdagangan, jasa, dan transportasi. Namun demikian, agar pembangunan ini memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik, pengendalian dampak lingkungan, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.



Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2030

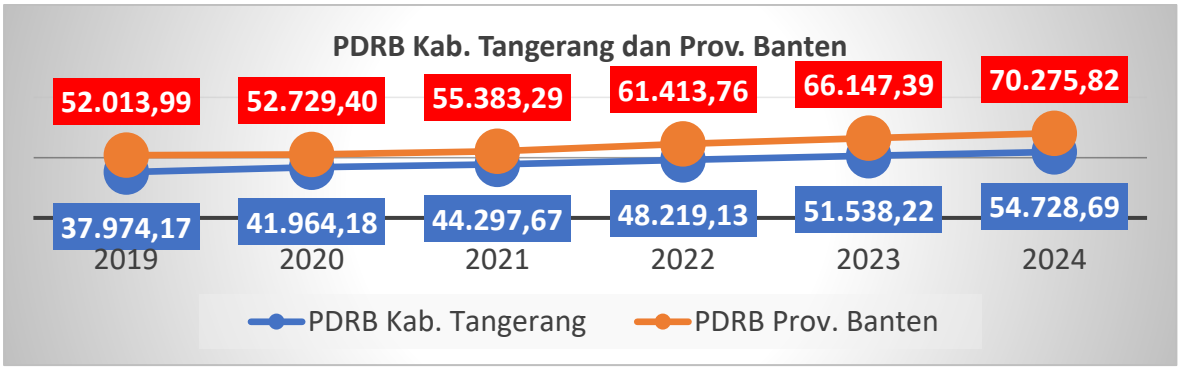
Gambar 4.5 *Positioning Matrix* Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang

Gambar di atas merupakan hasil analisis Positioning Matrix Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan berdasarkan tren laju pertumbuhan dan besaran nilai PDRB dari 17 sektor lapangan usaha. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sebagian besar lapangan usaha PDRB—termasuk sektor-sektor dengan kontribusi terbesar seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar—berada pada kategori Sektor Potensial. Artinya, sektor-sektor ini memiliki kontribusi besar namun memerlukan percepatan pertumbuhan agar semakin kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan daya saing, antara lain melalui akselerasi produktivitas tenaga

kerja, pengembangan pasar domestik maupun ekspor, serta peningkatan nilai tambah (value added) dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan termasuk dalam kategori Sektor Unggulan, yakni sektor yang tidak hanya memiliki kontribusi besar, tetapi juga menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi. Posisi Kabupaten Tangerang yang strategis sebagai bagian dari kawasan penyangga Jakarta dan wilayah metropolitan Jabodetabek turut memperkuat daya tarik daerah ini untuk pengembangan sektor industri, konstruksi, dan jasa, sejalan dengan perkembangan kawasan perumahan, kawasan industri, serta pusat perdagangan modern.

Sebagai tambahan, untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor unggulan tersebut, diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, Kabupaten Tangerang tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga mampu berkontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang dapat mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang di bawah Provinsi Banten.



Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2030

Gambar 4.6 PDRB per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2024

Pada tahun 2024, capaian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Tangerang sebesar 54,73 juta rupiah dan capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian PDRB per kapita Kabupaten Tangerang terendah ketiga. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan nilai tambah sektor unggulan dalam rangka mendorong pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

2. Kondisi Perindustrian Kabupaten Tangerang

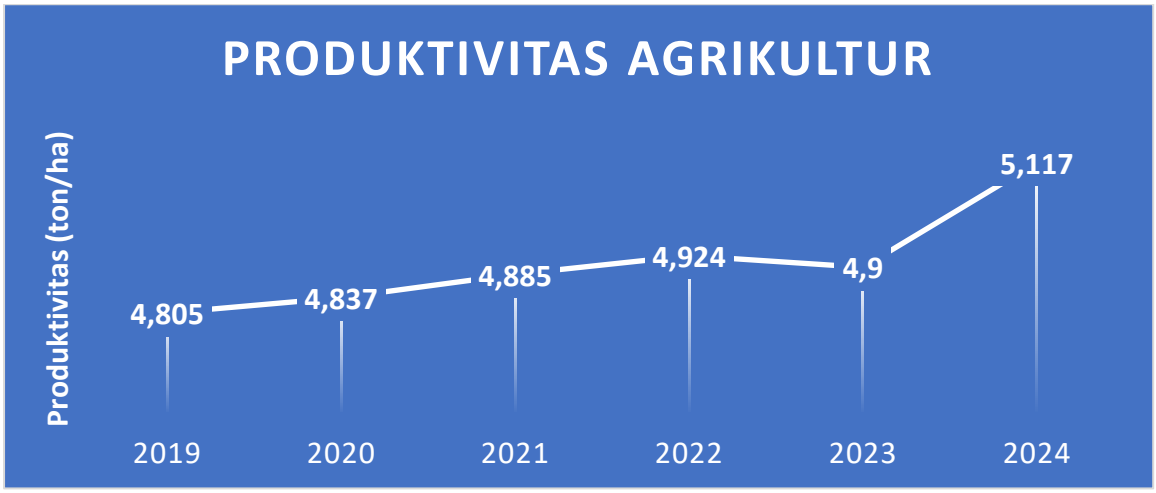
Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan sangat pesat di Kabupaten Tangerang. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Tangerang berkisar antara 34 – 35% meskipun mengalami tren pertumbuhan yang stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sektor penyokong perekonomian Kabupaten Tangerang. Namun, sektor industri mengalami pertumbuhan yang fluktuatif yang mana terjadi penurunan dalam kurun waktu 2020 – 2021 tetapi meningkat kembali pada tahun 2022 – 2023.

3. Produktivitas Pertanian Kabupaten Tangerang

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya merupakan nilai produksi rata-rata per satuan luas per komoditas tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada periode satu tahun. Produktivitas ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan sektor pertanian, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Di Kabupaten Tangerang, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya menunjukkan tren yang positif dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Tercatat pada tahun 2019, produktivitas mencapai 4,805 ton/ha, dan meningkat menjadi 5,117 ton/ha pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penerapan praktik budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah melalui program-program pemberdayaan petani dan penyediaan sarana produksi pertanian. Dengan capaian ini, produktivitas pertanian pangan di

Kabupaten Tangerang diharapkan dapat terus meningkat dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada impor, serta berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Peningkatan produktivitas ini juga membawa dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Tangerang. Dengan hasil panen yang lebih tinggi per hektar, pendapatan petani pun berpotensi meningkat, sehingga dapat memperbaiki taraf hidup dan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Selain itu, ketersediaan bahan pangan lokal yang memadai mampu menjaga stabilitas harga di pasar, memberikan manfaat bagi konsumen, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Ke depan, sinergi antara petani, pemerintah, dan pihak swasta perlu terus diperkuat agar peningkatan produktivitas ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.



Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2030

Gambar 4.7 Produktivitas Agrikultur (Ton/Ha) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

4.3.3 Profil Sosial

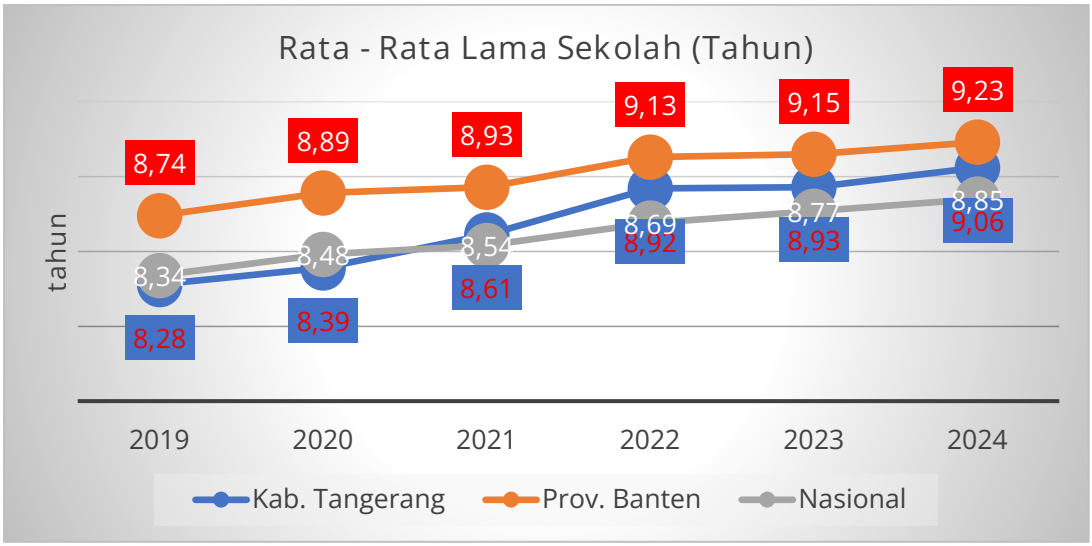
Profil sosial Kabupaten Tangerang terdiri atas indikator-indikator penting, yaitu rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Keempat indikator ini menjadi cerminan kualitas hidup masyarakat dan menggambarkan sejauh mana pembangunan ekonomi di Kabupaten Tangerang bersinergi dengan kondisi sosial masyarakat. Rata-rata lama sekolah mencerminkan

akses dan kualitas pendidikan, sementara usia harapan hidup menjadi indikator kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh kualitas layanan kesehatan dan lingkungan hidup. Di sisi lain, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan sejauh mana pembangunan ekonomi mampu menekan ketimpangan dan menyediakan peluang kerja bagi penduduk. Sinergi positif antara perkembangan ekonomi dan kondisi sosial ini sejalan dengan mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

1. Rata – Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan nilai yang menunjukkan rerata lama waktu yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menyelesaikan pendidikannya. Kabupaten Tangerang memiliki RLS sebesar 9,06 tahun, atau hampir setara dengan masa tempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Secara umum, RLS di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam capaian kualitas pendidikan serta semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal. Peningkatan ini juga menjadi salah satu indikator positif yang mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah. Namun, apabila dibandingkan dengan wilayah lain di tingkat provinsi maupun nasional, capaian RLS Kabupaten Tangerang masih cenderung lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kualitas dan pemerataan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat upaya peningkatan pendidikan formal, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penguatan kualitas tenaga pendidik, maupun program-program pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dan semangat untuk menuntaskan pendidikan minimal hingga jenjang menengah atas. Dengan demikian, Kabupaten Tangerang diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan memperkuat daya saing SDM-nya dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada pada posisi standar atau di tengah-tengah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, dengan capaian sebesar 9,06 tahun. Angka ini masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Banten yang mencapai 9,23 tahun. Jika dilihat lebih rinci, Kota Tangerang Selatan mencatatkan RLS tertinggi di Provinsi Banten, yaitu 11,86 tahun, yang menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan formal warganya relatif lebih baik dan merata hingga jenjang pendidikan menengah atas bahkan perguruan tinggi. Sementara itu, Kabupaten Lebak memiliki RLS paling rendah, yakni 6,61 tahun, mencerminkan masih terbatasnya akses atau peluang masyarakatnya dalam menyelesaikan pendidikan formal. Posisi Kabupaten Tangerang yang berada di tengah-tengah menggambarkan bahwa meskipun perkembangan pendidikan telah menunjukkan tren positif, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif agar capaian RLS dapat melampaui rata-rata provinsi dan mendekati wilayah-wilayah dengan performa terbaik, seperti Kota Tangerang Selatan. Hal ini penting untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih merata sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

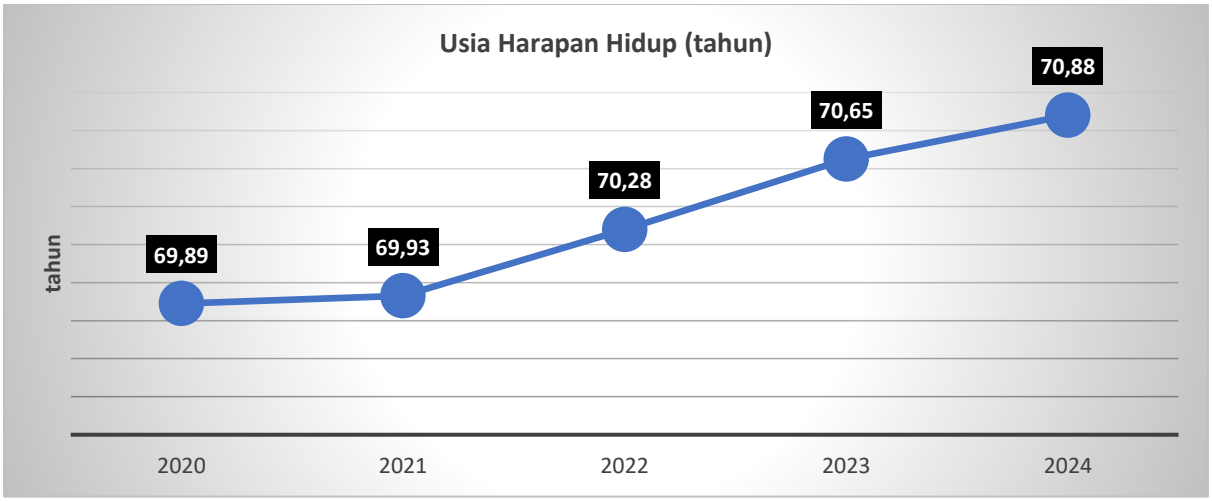


Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2030

Gambar 4.8 Rata – Rata Lama Sekolah Kab. Tangerang, Prov. Banten, dan Nasional

2. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah, yang menjadi salah satu indikator utama untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai angka 75,34 tahun, yang tergolong dalam kategori usia harapan hidup tinggi. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas gizi, serta membaiknya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Tren UHH di Kabupaten Tangerang juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan upaya pembangunan sektor kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, UHH Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 menempati posisi ketiga dengan capaian tertinggi, sekaligus sudah melampaui rata-rata UHH Provinsi Banten maupun nasional. Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu didukung dengan arahan strategis yang lebih terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Upaya seperti peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup harus terus dioptimalkan agar UHH dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.



Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 -2030

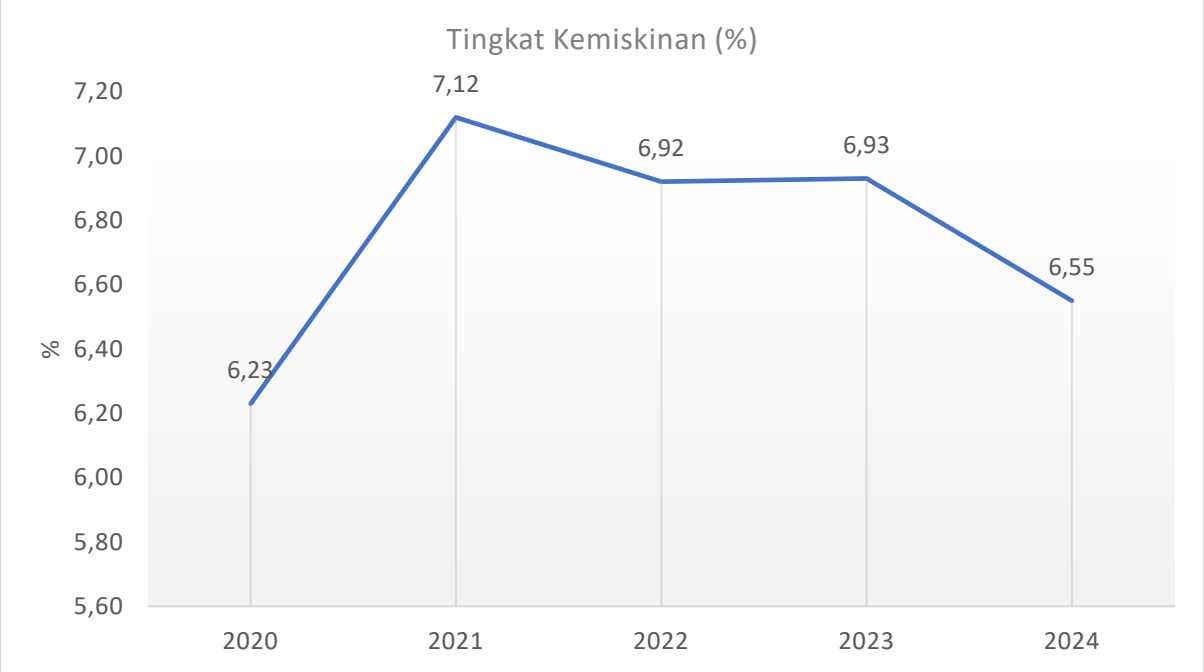
Gambar 4.9 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019–2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan mengganggu berbagai sektor mata pencaharian masyarakat. Namun, pada periode 2022–2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan berjalannya berbagai program pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial. Meski demikian, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 masih tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi yang sebesar 5,84%. Kabupaten Pandeglang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 9,18%, sementara tingkat kemiskinan terendah ada di Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya yang lebih intensif dan terarah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang, melalui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, penting bagi Kabupaten Tangerang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah strategis seperti pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, perluasan akses usaha mikro dan kecil, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta optimalisasi program perlindungan sosial harus terus diupayakan secara berkesinambungan. Selain itu, upaya pengurangan kemiskinan perlu disertai dengan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi agar masyarakat miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan

partisipatif, Kabupaten Tangerang dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus memperkuat pondasi pembangunan inklusif dan berkeadilan.



Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2030

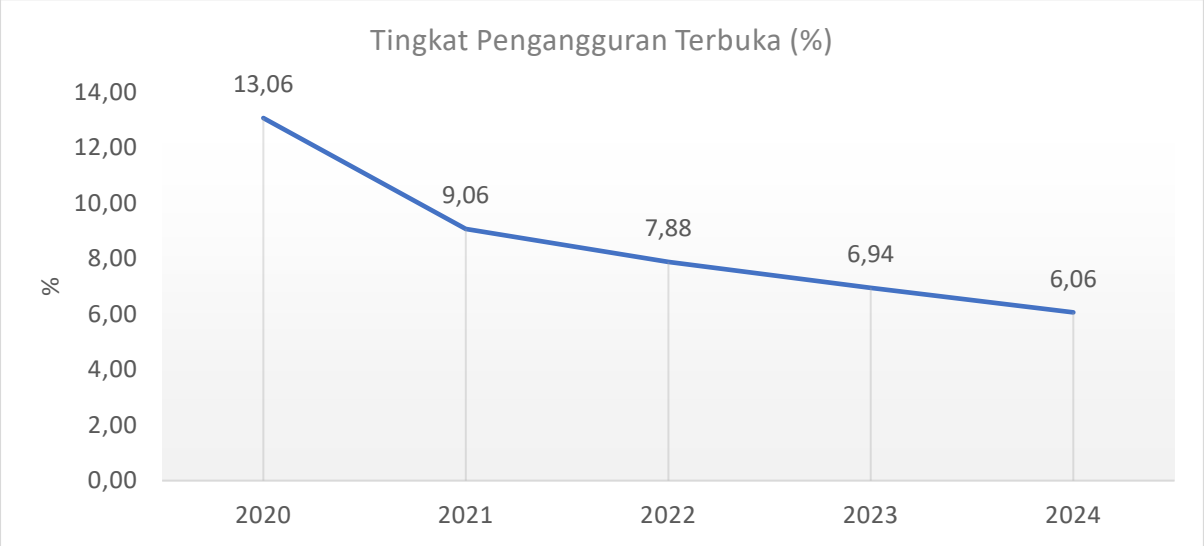
Gambar 4.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk usia kerja yang belum bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. TPT digunakan sebagai salah satu alat penting untuk mengevaluasi kondisi penyerapan tenaga kerja dan efektivitas pasar kerja di suatu wilayah. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 6,06% atau sekitar 102.510 jiwa. Angka ini tergolong dalam kategori sedang dan masih berada di atas rata-rata TPT nasional, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk penduduk usia produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Tangerang belum terserap ke dalam dunia kerja sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih efektif, baik berupa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan angkatan kerja, maupun perluasan kesempatan usaha. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, TPT Kabupaten

Tangerang pada tahun 2024 justru berada pada posisi yang relatif lebih baik, yakni menempati posisi ketiga terendah. Kota Tangerang Selatan memiliki TPT terendah sebesar 5,09%, sedangkan Kabupaten Serang mencatatkan TPT tertinggi sebesar 9,18%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan pengangguran masih ada, kinerja penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang cenderung lebih baik dibandingkan sejumlah wilayah lainnya di provinsi ini.

Sebagai upaya ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan dunia usaha untuk memastikan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, penguatan sektor informal, UMKM, serta inovasi pada sektor-sektor berbasis teknologi dan ekonomi kreatif juga dapat menjadi strategi untuk memperluas peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran secara berkelanjutan.



Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2025 – 2030

Gambar 4.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang

BAB V INDEKS EKONOMI HIJAU KABUPATEN TANGERANG

5.1 Skor Indikator Masing – Masing Pilar

Kabupaten Tangerang sebagai wilayah urban dan peri-urban memiliki tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen untuk menilai keberhasilan upaya keberlanjutan adalah **Indeks Ekonomi Hijau**, yang mencakup indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial.

5.1.1 Indikator Lingkungan

Laporan ini menyajikan deskripsi mendetail terhadap data capaian beberapa indikator pilar lingkungan selama periode 2020-2024. Data tersebut menjadi cerminan kondisi aktual sekaligus dasar rekomendasi kebijakan.

Tabel 5-1 Skor Per Indikator Lingkungan

No	Indikator	Nilai Minimum		Target		Adj. Skor Indikator				
		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tutupan Lahan Hutan	30%	%	54%	%	0,00	0,28	0,55	1,00	1,00
2	Kontribusi Energi Terbarukan	0%	%	42%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Sampah yang terkelola	0%	%	82%	%	63,83	108,54	111,50	114,71	114,71
4	Persentase reduksi emisi gas rumah kaca	0%	%	70%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase penurunan lahan gambut	30%	%	0%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Skor Lingkungan						**31,91**	**54,41**	**56,03**	**57,85**	**57,85**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

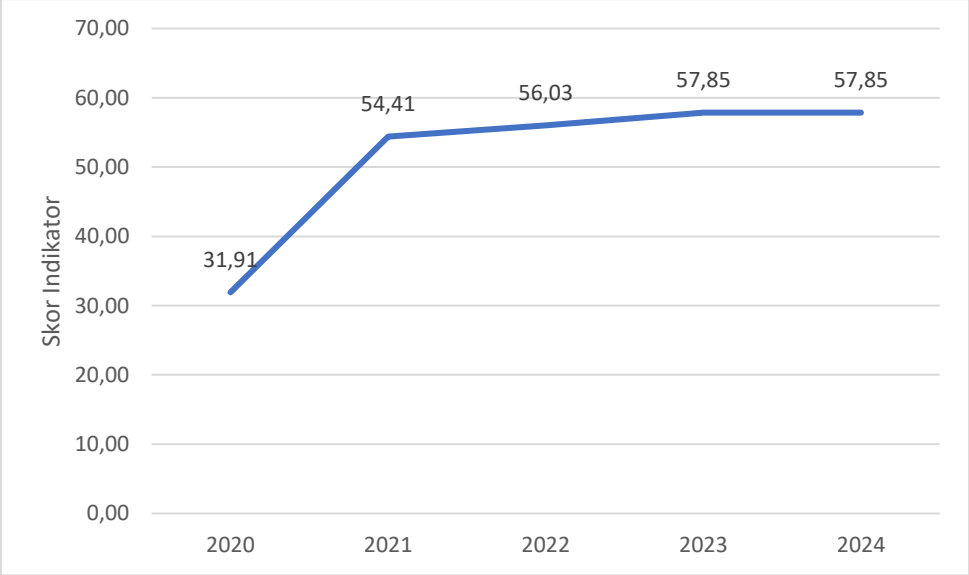
Capaian RTH Publik di Kabupaten Tangerang memperlihatkan penurunan. Tahun 2020 masih di angka 21%, namun turun menjadi 15% di 2024. Angka ini jauh di bawah target minimal 54%. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya tekanan konversi lahan akibat urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Skor yang negatif menunjukkan deviasi signifikan dari target, memperlihatkan bahwa upaya perlu difokuskan pada kebijakan perluasan dan perlindungan RTH.

Indikator energi terbarukan tidak memiliki data capaian (n/a) dalam tabel. Ini menunjukkan belum adanya pelaporan spesifik atau realisasi program yang terukur. Padahal, kontribusi energi terbarukan sangat penting dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai ekonomi hijau. Tidak adanya data menjadi catatan kritis untuk penataan sistem monitoring dan evaluasi energi hijau.

Kabupaten Tangerang menunjukkan progres positif dalam pengelolaan sampah. Sejak 2020, capaian terus naik, meski masih jauh dari target 82%. Tahun 2024, angka pengelolaan sampah baru mencapai 58%. Ini menunjukkan kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan, namun perlu percepatan teknologi daur ulang, edukasi publik, dan infrastruktur persampahan. Skor indikator sampah yang terkelola mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan skor ini menunjukkan adanya langkah maju dan efektivitas program pemerintah daerah, meskipun capaian secara kuantitatif masih harus ditingkatkan untuk mencapai target nasional.

Data reduksi emisi gas rumah kaca tidak tersedia dalam tabel (n/a). Padahal, indikator ini menjadi kunci utama dalam mitigasi perubahan iklim. Absennya data menunjukkan kelemahan dalam integrasi perencanaan kebijakan iklim daerah dan monitoring pelaksanaan aksi mitigasi. Data indikator penurunan lahan gambut juga tidak tersedia. Kabupaten Tangerang mungkin memiliki area gambut yang relatif kecil, namun tidak adanya data membuat analisis risiko lingkungan menjadi terbatas. Lahan gambut penting dijaga karena berperan sebagai penyimpan karbon alami.

Skor Lingkungan Kabupaten Tangerang secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari 2020 ke 2021, namun relatif stagnan setelahnya. Meskipun mengalami kenaikan, skor masih tergolong rendah, menandakan tantangan besar untuk mencapai pembangunan ekonomi hijau yang seimbang. Tantangan utama Kabupaten Tangerang terletak pada ketersediaan data, pengendalian laju urbanisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.



Gambar 5.1 Tren Skor Indikator Lingkungan Kabupaten Tangerang

Gambar di atas menunjukkan bahwa indikator lingkungan di Kabupaten Tangerang mengalami perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, skor indikator lingkungan Kabupaten Tangerang berada di angka 31,91, yang termasuk dalam kategori sedang tier 2. Skor ini mencerminkan adanya berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada masa itu, termasuk tekanan akibat urbanisasi, industrialisasi, serta keterbatasan infrastruktur pendukung lingkungan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terlihat adanya perbaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, skor lingkungan melonjak menjadi 54,41, menunjukkan bahwa berbagai upaya penguatan kebijakan, perbaikan tata kelola lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat mulai membuahkan hasil. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana skor lingkungan Kabupaten Tangerang mencapai 57,85, sehingga secara keseluruhan telah masuk dalam kriteria baik tier 1. Peningkatan ini menunjukkan

keberhasilan Kabupaten Tangerang dalam memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, melalui berbagai program diantaranya pengelolaan sampah dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Namun skor ini masih dapat berkembang lagi seiring dengan penyesuaian indikator yang sesuai dengan ketersediaan data yang ada di Kabupaten Tangerang.

5.1.2 Indikator Ekonomi

Aspek – aspek yang dikaji dalam indikator ekonomi ini diantaranya hanya PDRB per kapita dan juga produktivitas agrikultur. Aspek lain seperti intensitas emisi, intensitas energi final, produktivitas tenaga kerja sektor industri, dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa belum dimasukkan ke dalam perhitungan dikarenakan keterbatasan data.

Tabel 5-2 Skor Per Indikator Ekonomi

No	Indikator	Nilai Minimum		Target		Adj. Skor Indikator				
		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
6	Intensitas Emisi	270	TCO_2eq/ BnRp	26	TCO_2eq/ BnRp	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Intensitas Energi Final	125	BOE/ BnRp	63	BOE/ BnRp	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Pendapatan Nasional Bruto (GNI)	500	USD	12695	USD	15,56	17,62	18,83	20,86	22,58
9	Produktivitas Agrikultur	5	ton/ha/ tahun	12	ton/ha/ tahun	0,00	0,17	0,31	0,23	1,67
10	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	20	Juta Rp/ orang/ tahun	200	Juta Rp/ orang/ tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	20	Juta Rp/ orang	200	Juta Rp/ orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Skor Ekonomi						7,8	8,9	9,6	10,5	12,1

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Intensitas emisi merupakan indikator yang mengukur jumlah emisi gas rumah kaca (CO2eq) per nilai tambah ekonomi (BnRp) yang dihasilkan. Target yang ingin dicapai adalah 26 TC02eq/BnRp dengan batas minimum 270. Namun, pada periode 2020–2024, skor intensitas emisi belum tersedia (n/a). Hal ini menunjukkan bahwa data terkait

upaya penurunan intensitas emisi belum terlaporkan atau belum terukur secara sistematis selama periode tersebut. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lingkungan, terutama dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon di Kabupaten Tangerang.

Intensitas energi final mengukur efisiensi penggunaan energi dalam perekonomian, dengan satuan BOE/BnRp (barrel oil equivalent per miliar rupiah). Target yang ditetapkan adalah 63 dengan batas minimum 125. Sayangnya, seperti pada indikator emisi, tidak tersedia skor intensitas energi final sepanjang 2020–2024 (n/a). Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam pencatatan, pengawasan, dan pelaporan data konsumsi energi agar dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan efisiensi energi di masa mendatang.

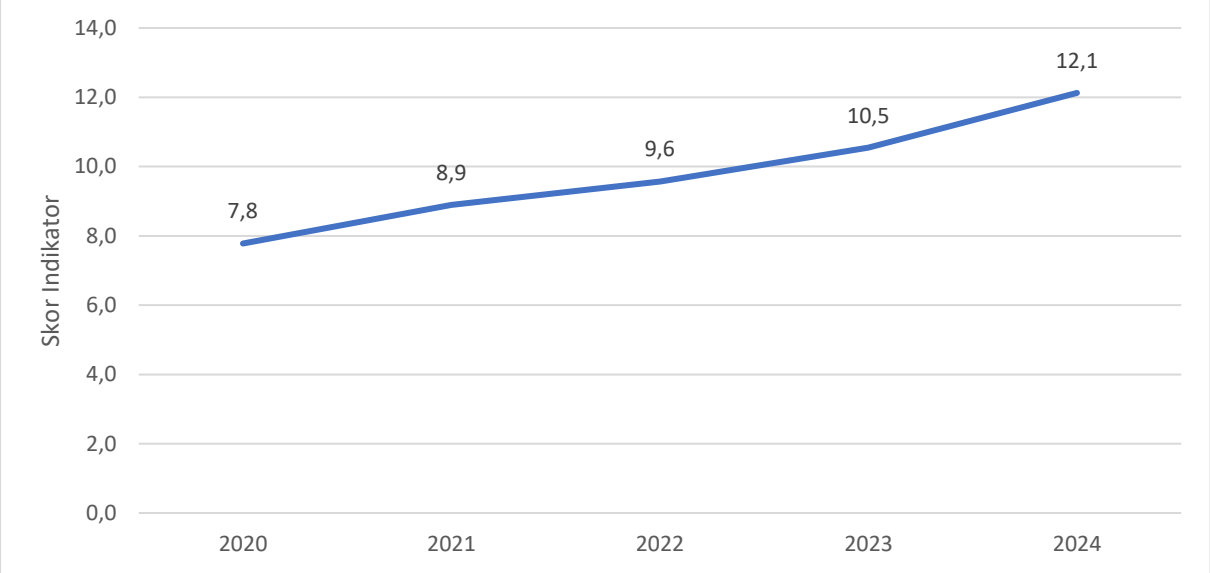
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selama periode 2020–2024, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan skor dari 15,56 pada 2020 menjadi 22,58 pada 2024. Meskipun terjadi perbaikan setiap tahun, capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 12.695 USD. Kenaikan ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi, namun perlu diiringi dengan strategi percepatan pembangunan ekonomi inklusif agar PDRB dapat meningkat secara lebih signifikan dan merata.

Produktivitas agrikultur menunjukkan kemampuan sektor pertanian dalam menghasilkan output per hektare lahan per tahun. Target produktivitas adalah 12 ton/ha/tahun dengan nilai minimum 5. Selama 2020–2024, skor produktivitas agrikultur meningkat dari **0,00** pada 2020 menjadi **1,67** pada 2024. Peningkatan ini menandakan adanya upaya perbaikan dalam produktivitas sektor pertanian, walaupun capaian masih sangat rendah dibanding target. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam hal modernisasi pertanian, peningkatan akses teknologi, serta dukungan pada petani agar produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan.

Indikator ini mengukur nilai tambah per orang per tahun pada sektor industri, dengan target 200 juta Rp/orang/tahun dan batas minimum 20 juta Rp/orang/tahun. Namun, data untuk produktivitas sektor industri tidak tersedia sepanjang periode 2020–2024

(n/a). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pelaporan data produktivitas sektor industri untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah serta peluang perbaikan produktivitas tenaga kerjanya.

Produktivitas tenaga kerja sektor jasa juga tidak memiliki data (n/a) selama 2020–2024. Padahal sektor jasa merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan seperti Kabupaten Tangerang. Target produktivitas ditetapkan sebesar 200 juta Rp/orang, dengan nilai minimum 20 juta Rp/orang. Ketiadaan data ini menjadi sinyal perlunya perhatian untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi sektor jasa agar dapat mendukung pengambilan kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.2 Tren Skor Indikator Ekonomi

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pilar ekonomi di Kabupaten Tangerang terus menerus mengalami peningkatan. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 skor untuk indikator pilar ekonomi berada pada kriteria **kurang** yang artinya Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan kondisi perekonomian berdasarkan kriteria ekonomi hijau. Namun angka ini masih bersifat sangat sementara mengingat ketersediaan data yang kurang dan juga terdapat

indikator – indikator yang dapat disesuaikan kembali dengan konteks Kabupaten Tangerang.

5.1.3 Indikator Sosial

Aspek yang dibahas dalam indikator sosial meliputi rata – rata lama sekolah, umur harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 5-3 Skor Per Indikator Sosial

No	Indikator	Nilai Minimum		Target		Skor Indikator				
		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
12	Rata Rata Lama Sekolah	2	tahun	12	tahun	63,90	66,10	69,20	69,30	70,60
13	Harapan Hidup	55	tahun	75,5	tahun	72,63	72,83	74,54	76,34	77,46
14	Tingkat Kemiskinan	13,00	%	0,00	%	52,08	45,23	46,77	46,69	49,62
15	Tingkat Pengangguran	15,00	%	3,00	%	16,17	49,50	59,33	67,17	74,50
Skor Sosial						51,19	58,42	62,46	64,88	68,04

Sumber: Hasil Analisis, 2025

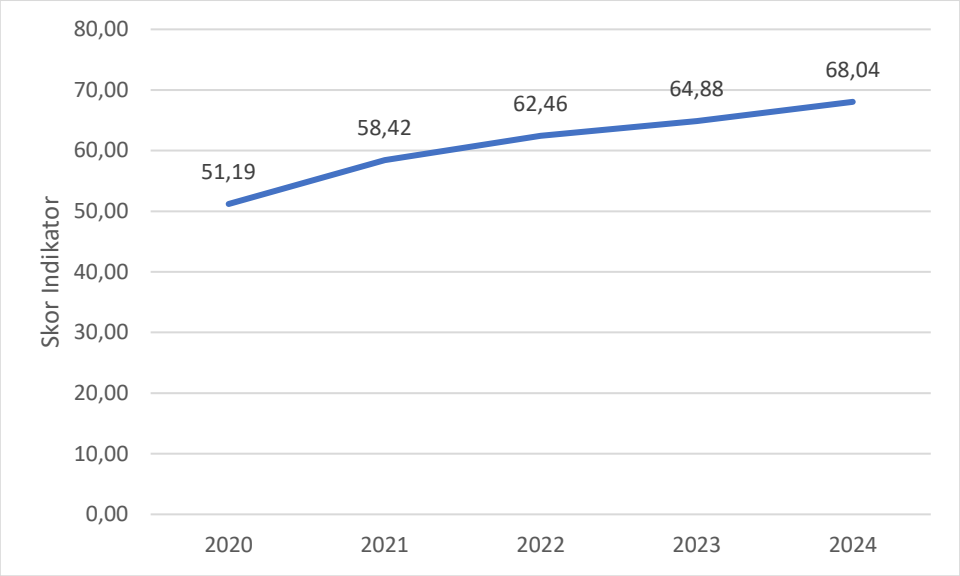
Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator penting untuk menilai capaian pendidikan formal masyarakat. Pada periode 2020 hingga 2024, RLS di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan skor dari **63,90** pada 2020 menjadi **70,60** pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan dan keberhasilan program wajib belajar di tingkat dasar hingga menengah. Meskipun demikian, capaian ini masih menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat belum sepenuhnya mendekati target 12 tahun, yang setara dengan jenjang pendidikan menengah atas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih intensif untuk mendorong partisipasi pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, termasuk pengurangan angka putus sekolah dan peningkatan akses ke pendidikan berkualitas.

Harapan hidup menjadi cerminan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Selama periode 2020–2024, skor harapan hidup mengalami peningkatan yang signifikan dari **72,63** pada 2020 menjadi **77,46** pada 2024.

Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam layanan kesehatan, gizi masyarakat, serta lingkungan hidup yang mendukung kualitas kesehatan. Keberhasilan ini harus terus dijaga dengan memperkuat sistem kesehatan, pemerataan akses layanan, dan pengendalian penyakit agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan merupakan indikator utama untuk melihat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sepanjang 2020 hingga 2024, skor tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi dan hanya sedikit perbaikan, dari **52,08** pada 2020 menjadi **49,62** pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan pemerataan hasil pembangunan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih terarah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, perluasan akses pekerjaan, serta penguatan program jaring pengaman sosial agar angka kemiskinan dapat terus ditekan mendekati target 0%.

Tingkat pengangguran terbuka menjadi cerminan daya serap tenaga kerja di wilayah ini. Selama periode 2020–2024, skor tingkat pengangguran menunjukkan tren perbaikan yang cukup pesat, dari **16,17** pada 2020 menjadi **74,50** pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam membuka lapangan kerja baru dan memperkuat daya serap pasar tenaga kerja. Namun, meskipun perbaikan signifikan telah dicapai, angka pengangguran masih cukup jauh dari target ideal sebesar 3%. Oleh karena itu, penting untuk terus memperluas peluang kerja produktif, mendorong wirausaha, dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.3 Tren Skor Indikator Sosial

Secara tren, pilar sosial di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang konsisten terhitung mulai dari tahun 2020 yang berada pada angka 51,19 (**baik *tier* 1**) dan terus meningkat hingga mencapai angka 68,04 (**baik *tier* 2**) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial di Kabupaten Tangerang semakin baik dari tahun ke tahunnya. Namun angka tersebut tetap berada di bawah target yang ditetapkan oleh Indeks Ekonomi Hijau sehingga masih perlu ada upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk semakin meningkatkan kondisi sosial di Kabupaten Tangerang.

5.2 Tren Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang

Setelah mendapatkan skor dari masing – masing pilar, maka selanjutnya adalah menghitung skor keseluruhan dari masing – masing pilar agar tersusun Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang.

Tabel 5-4 Skor Total Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Lingkungan	31,91	54,41	56,03	57,85	57,85
Ekonomi	7,78	8,90	9,57	10,54	12,13
Sosial	51,19	58,42	62,46	64,88	68,04
IEH	35,52	45,04	47,63	49,54	51,52

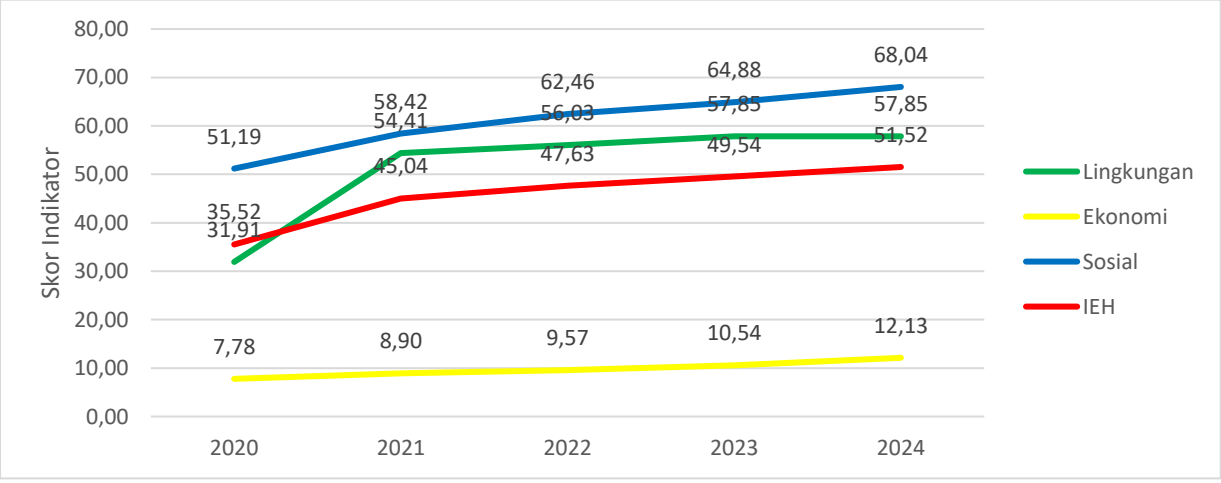
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Indikator Lingkungan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, dimana nilai indeksnya naik dari 31,91 pada 2020 menjadi 57,85 pada 2023, dan kemudian stagnan di angka yang sama pada 2024. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan yang cukup besar dalam aspek lingkungan selama periode tersebut, meskipun pada tahun terakhir nilai tersebut tidak mengalami perubahan.

Indikator Ekonomi juga mengalami peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir, dari nilai 7,78 pada 2020 menjadi 12,13 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan aspek ekonomi yang positif dan menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi yang diukur oleh indikator tersebut.

Indikator Sosial menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Nilainya naik dari 51,19 pada 2020 menjadi 68,04 pada 2024, menandakan kemajuan yang terus menerus dalam aspek sosial, yang dapat berkaitan dengan kualitas hidup, kesejahteraan, atau kondisi sosial masyarakat.

Indeks Ekonomi Hijau (IEH) sebagai indikator komposit juga menunjukkan peningkatan dari 35,52 pada 2020 menjadi 51,52 pada 2024. Kenaikan IEH ini mencerminkan kemajuan secara keseluruhan dalam integrasi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.4 Tren Perkembangan Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang

Gambar tersebut menunjukkan tren positif perkembangan skor Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Tangerang. Terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 yang mana dengan skor 35,52, IEH Kabupaten Tangerang berada pada kriteria **sedang *tier* 2**. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 yang berada pada angka 51,52 atau kriteria **baik *tier* 1.** Hal ini menandakan adanya upaya serius dari Kabupaten Tangerang dalam rangka memenuhi pencapaian ekonomi hijau meskipun terdapat beberapa kendala khususnya pada pilar ekonomi dan lingkungan. Angka tersebut bersifat sangat sementara dan dapat berkembang lagi seiring dengan ketersediaan data – data analisis Indeks Ekonomi Hijau.

5.3 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Tangerang, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu mendorong pencapaian ekonomi hijau di Kabupaten Tangerang.

1. Adanya penguatan pemantauan emisi sektoral secara periodik mulai dari sektor rumah tangga hingga industri agar memastikan ketersediaan data dan lebih lanjut lagi memastikan upaya seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tangerang berpartisipasi aktif dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca.
2. Mendorong industri untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan melalui skema fiskal seperti pengurangan pajak ataupun subsidi energi ramah lingkungan.
3. Pengembangan energi terbarukan di tingkat lokal seperti pemasangan panel surya atap di kawasan – kawasan industri ataupun perumahan – perumahan.
4. Adanya diversifikasi basis ekonomi dengan mengembangkan sektor – sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi seperti industri teknologi, ekonomi kreatif, dan jasa modern.
5. Memperluas kualitas SDM diantaranya dengan perluasan akses pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pengentasan pengangguran yang mana sebagai akibat dari sumber daya manusia yang berkualitas dan berketerampilan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Green Economy Index : A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia. *Bappenas*, 39.

UNEP. (2012). *Measuring Progress towards an Inclusive Green Economy*. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/32438;jsessionid=92F4273155AF70FF58C0A30A36CD1C7F

UNGA. (2012). *United Nations*. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*.